

TANGGAPAN BP TERHADAP

LAPORAN KEDUA PANEL INDEPENDEN TANGGUH

MENGENAI OPERASI DAN USULAN PENGEMBANGAN

PADA

LNG TANGGUH

Januari 2016

AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Bupati	Pimpinan Kabupaten
CAP	<i>Community Action Plan</i> – program dukungan untuk memfasilitasi proyek pembangunan yang digerakkan oleh masyarakat di Desa-desa yang Terpengaruh secara langsung - Directly Affected Villages (DAV)
DAV	<i>Directly Affected Villages</i> Desa-desa yang diidentifikasi sebagai langsung dipengaruhi oleh Proyek Tangguh
DBH	Dana Bagi Hasil
DBH SDA	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
GoI	<i>Government of Indonesia</i> Pemerintah Indonesia
ICBS	<i>Integrated Community Based Security</i> Program Keamanan Terintegrasi Berbasis Masyarakat
IEDP	<i>Indigenous Enterprise Development Program</i> Program Pengembangan Kewirausahaan Masyarakat Asli
IHT	<i>In-House Human Right Training</i> Pelatihan Hak-hak Asasi Manusia Swakarya
JUKLAP	Petunjuk Lapangan
Kabupaten	Distrik atau Kabupaten
Kapolda	Kepala Kepolisian Daerah
Elsham	LSM Hak Asasi Manusia di Papua
LP3BH	Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Bantuan Hukum
LNG	<i>Liquid Natural Gas</i> Gas Alam Cair
Mmscfd	Juta Standar Kaki Kubik per Hari
Musrenbang	Musyawaharah Perencanaan Pembangunan
MoE	<i>Ministry of Environment</i> Kementerian Lingkungan Hidup
MoU	<i>Memorandum of Understanding</i> Nota Kesepahaman
MRP	Majelis Rakyat Papua
NGO	<i>Non Government Organization</i> Lembaga Swadaya Masyarakat
Pangdam	Panglima Komando Daerah Militer
Perdasus	Peraturan Daerah Khusus

PLN	Perusahaan Listrik Negara
PoD	Rencana Pengembangan
Polda	Kepolisian Daerah
Polres	Kepolisian Resor
Polsek	Kepolisian Sektor
PONED	Pelayanan Obstetri-Neo natal Emergensi Dasar
Proper	Audit kepatuhan AMDAL yang dijalankan Kementerian Lingkungan Hidup
PSC	<i>Production Sharing Contract</i> Kontrak Bagi Hasil
PSCM	<i>Procurement and Supply Chain Management</i> Manajemen Pengadaan dan Rantai Pasokan
PSKK UGM	Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada
S&OR	<i>Safety & Operation Risk</i> Risiko Keselamatan dan Operasional
SKK Migas	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas, lembaga pemerintah Indonesia yang merupakan regulator dalam Proyek Tangguh (yang menggantikan BPMIGAS)
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SOA	<i>Supply Offtake Agreement</i> Kesepakatan Pembelian Produksi Pertambangan
SPA	<i>Sales Purchase Agreement</i> Perjanjian Jual Beli
TEP	<i>Tangguh Expansion Project</i> Proyek Pengembangan Tangguh
TIAP	<i>Tangguh Independent Advisory Panel</i> Panel Penasihat Independen Tangguh
TNI	Tentara Nasional Indonesia
TPC	<i>Third Party Contract</i> Kontrak Pihak Ketiga
UNIPA	Universitas Negeri Papua di Manokwari, Papua Barat
VPSHR	<i>Voluntary Principles of Security and Human Right</i> Prinsip-Prinsip Sukarela Untuk Keamanan Dan Hak Asasi Manusia
YSA	Yayasan Sosial Agustinus (mitra pelaksana untuk kesehatan)
YPTB	Yayasan Pembangunan Teluk Bintuni

Pengantar

BP mengucapkan terima kasih kepada Panel Penasihat Independen Tangguh (TIAP) yang kini menjabat, atas laporan dan analisis ahli, tantangan dan panduan yang diberikannya. Fokus utama TIAP adalah masalah keamanan, hak asasi manusia, tata kelola dan pengelolaan pendapatan, serta isu-isu non-komersial lain. Isi laporan ini melengkapi kajian independen panel eksternal yang dilaksanakan oleh Grup Pemberi Pinjaman Tangguh.

Rekomendasi yang diberikan TIAP yang saat ini tengah menjabat dan pendahulunya sangat bermanfaat untuk mendukung upaya kami menjadikan Proyek Tangguh sebagai barometer keberhasilan kerja sama dengan masyarakat lokal dan mitra lain untuk mengelola isu-isu sosial, ekonomi dan lingkungan yang kompleks. TIAP membantu kami memastikan LNG Tangguh memberikan manfaat bagi BP, masyarakat lokal, pemerintah, karyawan, konsumen dan investor.

Kunjungan TIAP terdahulu dilaksanakan dari tanggal 9 Juli sampai 18 Maret 2014. Lapornya diterbitkan bulan Oktober 2014 dan memuat 33 rekomendasi. Topik-topiknya mencakup keamanan dan hak asasi manusia, program sosial, hubungan pemerintah dan urusan publik, ketenagakerjaan dan pelatihan masyarakat Papua, tata kelola dan transparansi, pengelolaan pendapatan, dan lingkungan. BP telah menanggapi dan menerapkan berbagai rekomendasi tersebut (perkembangan terkininya dapat dilihat di Apendiks A).

Kunjungan terakhir TIAP dilakukan dari tanggal 7 September hingga 18 September 2015 dan laporannya telah diterbitkan di bulan Desember 2015. Dalam laporan ini, TIAP menyoroti perubahan yang terjadi di Tangguh di tingkat nasional dan lokal dan akibat tantangannya bagi Tangguh, ditambah dengan turunnya harga minyak secara drastis yang baru-baru ini melanda industri ini. TIAP juga mengamati dari dekat perubahan yang terjadi dalam Proyek Pengembangan Tangguh dan pelaksanaan AMDAL-nya yang baru sejak disetujui di tahun 2014.

Kami sangat menghargai analisis mendalam dan tajam dalam laporan komprehensif ini. Kami yakin laporan ini akan membantu kami menghadapi tantangan terkait pengoperasian Tangguh dalam jangka panjang serta mendukung pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat lokal.

Mengenai Proyek LNG Tangguh

Tangguh LNG memproduksi dan mengekspor gas alam cair (LNG) dari lapangan Vorwata yang terletak di Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, Indonesia, sekitar 3.000 kilometer di sebelah timur Jakarta.

Gas ditemukan di Teluk Bintuni pada tahun 1994 dengan cadangan terbukti sebanyak 14 triliun kaki kubik (tcf) setelah dieksplorasi. Gas diekstraksi melalui sumur yang digali menggunakan dua anjungan berkaki enam tak berawak yang dikendalikan dari jauh yaitu Vorwata-A dan Vorwata-B, kemudian dialirkan ke kilang pengolahan di sebelah selatan teluk melalui pipa bawah laut sepanjang 22 kilometer. Kilang ini mengoperasikan dua *train* atau perangkat pengolahan LNG dengan kapasitas produksi sekitar 7,6 juta ton LNG per tahun selama 25 tahun. LNG disimpan di dua tangki berkapasitas 170.000 meter kubik dan dialirkan melalui pipa ke dermaga untuk selanjutnya dimuat ke dalam kapal tanker.

Produksi LNG pertama kali dimulai pada Juni 2009, dan pengiriman pertama dilakukan sebulan setelahnya menggunakan kapal tanker ke Korea Selatan. Produksi meningkat dari 103 kargo di tahun 2012 menjadi 115 di tahun 2014, melebihi target awal 107 kargo. Di akhir tahun 2015, 646 kargo telah dikirim oleh Tangguh, dan kilang mencapai efisiensi operasional tahunan rata-rata sebesar 92,8. Studi perbandingan baru-baru ini menunjukkan bahwa kilang LNG Tangguh adalah salah satu kilang LNG dengan kinerja terbaik sedunia dan merupakan proyek BP dengan kinerja terbaik di bidang keselamatan dan biaya. Prestasi ini diraih dengan mematuhi semua komitmen nonteknis/eksternal kami.

Tanggung memiliki tujuh Perjanjian Jual Beli (SPA). Perjanjian ini untuk memasok LNG ke POSCO dan SK E&S Co., Ltd di Korea, Sempra LNG International LLC di Meksiko, CNOOC Fujian LNG Co.Ltd di China, serta Tohoku Electric Power Co., Inc., Chubu Electric Power Co.Inc., dan Kansai Electric Power Co. Inc. di Jepang. BP terus mencari peluang untuk memaksimalkan nilai kargo LNG Tangguh. Sejak 2010, beberapa kargo yang dialihkan dari Sempra telah dijual di pasar Asia dalam bentuk kontrak jangka menengah atau penjualan spot. Sejak 2013, Tangguh telah mengirimkan kargo ke pasar domestik termasuk untuk PLN, PGN, dan Nusantara Regas dari kargo yang dialihkan dari Sempra. Ini telah mengubah profil Tangguh secara signifikan di Indonesia sebagai penyedia kebutuhan energi dalam negeri.

Ke depannya, Tangguh berkomitmen untuk melanjutkan kegiatan operasional yang aman, andal dan meningkatkan efisiensi operasional Kilang 1 dan 2 pada kapasitas penuh, sementara pengembangan untuk membangun Kilang 3 tengah direncanakan. Proyek Pengembangan Tangguh (Tanggung Expansion Project TEP) akan memperluas kilang LNG yang ada sekarang. Kilang LNG 3 dan fasilitas penunjangnya akan berlokasi di dekat kilang 1 dan 2 yang ada sekarang. Proyek ini akan mengembangkan 4,3 triliun kaki kubik (Tcf) gas, melalui penambahan Kilang LNG standar 3,8 juta ton per tahun (mtpa) — untuk penjualan di pasar Indonesia dan Asia. Front End Engineering Design (FEED) diselesaikan di akhir 2015 dan kami sedang dalam proses persiapan untuk Keputusan Investasi Akhir atau *Final Investment Decision* (FID) di tahun 2016.

Di lepas pantai, hingga 2024, 13 sumur baru dan 1 sumur ineksi ulang akan dibor dari dua anjungan baru yang belum terpakai (Roabiba dan Wiriagar). Platform ini akan dihubungkan ke kilang LNG darat melalui jaringan pipa operasional dijadwalkan dimulai tahun 2020. Setelah proyek selesai, kilang Tangguh akan memiliki kapasitas total 11,4 mtpa.

Ada sebuah dokumen — Rencana Pengembangan II (PoD II) — yang menjabarkan cakupan penuh proyek yang meliputi pengembangan fasilitas dan pembangunan di bawah permukaan, kegiatan operasional, kesehatan, keselamatan dan lingkungan (HSE), manajemen dampak sosial, pengadaan, keuangan, komersial dan pemasaran. POD II disusun oleh BP dan diserahkan ke regulator hulu Pemerintah Indonesia, SKK Migas, bulan Agustus 2012. PoD II disetujui bulan November 2012 dan merupakan tonggak penting terkait persetujuan Pemerintah Indonesia terhadap proyek. Tonggak penting lainnya adalah disetujuinya dokumen AMDAL pada bulan Juni 2014. AMDAL merupakan analisis dampak sosial dan lingkungan serta rencana mitigasi yang diterapkan pemerintah. Di dalamnya berisi komitmen untuk mengatasi dampak lingkungan dan sosial dari proyek melalui tahapan pra-konstruksi sampai tahapan pasca-operasi. AMDAL yang baru sedikit berbeda pendekatannya dengan AMDAL lama. Sekarang, Tangguh memfokuskan mitigasi dampaknya untuk mendukung masyarakat adat dari Teluk Bintuni dan Fakfak, dengan memastikan keberlanjutan pembangunan sosial dengan melaksanakannya bersama dengan pemerintah setempat dan pemangku kepentingan lainnya

AMDAL yang baru ini didesain sebagai petunjuk untuk Tangguh dalam memenuhi komitmen sosialnya. Operasionalisasi AMDAL 5 tahun pertama ditetapkan di dalam buku Tangguh Sustainable Development Program (TSDP), yang diterbitkan pada pertengahan tahun 2015.

Pembangunan eksternal

Pembangunan infrastruktur di Teluk Bintuni selama dua tahun terakhir mencakup jalan dan lapangan terbang yang baru di kota Bintuni, jalan yang menghubungkan kota Bintuni dan kota Manokwari, serta jalan yang menghubungkan Bomberai di kabupaten Fakfak dan desa Tofoi di Kabupaten Teluk Bintuni. Pada waktu yang sama, pemerintah pusat berencana membangun zona industri di kabupaten Teluk Bintuni.

Pembangunan baru ini tidak hanya memberi beberapa manfaat bagi masyarakat Teluk Bintuni dan Fakfak, namun juga memunculkan tantangan bagi operasi Tangguh dalam menjaga keterpencilan lokasi dan meminimalkan interaksi fisik dengan masyarakat.

Dari sisi politik, Kabupaten Teluk Bintuni akan melaksanakan pemilihan kepala daerah saat laporan ini disusun. Bupati yang memimpin sekarang memiliki periode yang terbatas, yang berarti akan ada Bupati yang baru. Menjadi prioritas Tangguh untuk bekerja sama erat dengan pemerintah yang baru untuk menyamakan pendekatan AMDAL yang baru.

Kunjungan dan rekomendasi TIAP

Selama kunjungan yang terakhir, TIAP memusatkan perhatiannya terutama pada keamanan dan hak asasi manusia serta tata kelola dan pengelolaan pendapatan. TIAP juga mempertimbangkan topik-topik lain yang memiliki dampak tidak langsung terhadap keamanan. Ini mencakup program sosial Tangguh, ketenagakerjaan dan pelatihan masyarakat Papua, pengadaan, hubungan pemerintah dan urusan publik, serta lingkungan.

Tanggapan formal BP terhadap rekomendasi TIAP adalah sebagai berikut.

A. Rekomendasi umum

1. Rekomendasi TIAP: BP harus mendidik para pemimpin dan masyarakat mengenai kemungkinan pengembangan Tangguh yang mungkin tidak akan dimulai pada tahun 2016.

Tanggapan BP: Kami berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan secara teratur mengenai rencana atau aktivitas yang akan kami lakukan di sekitar teluk, yang akan berdampak pada masyarakat. Ini sudah merupakan kebiasaan yang telah kami lakukan secara rutin untuk BP/Tangguh sejak kami masuk ke area ini di awal tahun 2000.

Kami akan terus berkomunikasi dengan para pimpinan dan masyarakat di sekitar Operasi Tangguh dan tonggak penting proyek pengembangan Tangguh. Di dalamnya termasuk pengingat bahwa Keputusan Investasi Akhir untuk proyek pengembangan akan dilakukan di 2016.

2. Rekomendasi TIAP: Pemasangan jaringan listrik ke Babo dan desa-desa lainnya harus segera dilanjutkan, apakah konstruksi Kilang 3 dimulai pada tahun 2016 atau tidak.

Tanggapan BP: Pemasangan jaringan listrik di Babo dan desa-desa lainnya di Teluk Bintuni merupakan bagian dari program kelistrikan milik negara PLN di Bintuni. Seperti yang telah diatur dalam Kesepakatan Pembelian Produksi (*Supply Off-take Agreement*, SOA) yang ditandatangani pada tahun 2012, Tangguh berencana memasok 4+4 MW ke PLN dan tahap pertama akan diselesaikan tahun 2014.

Kami bekerjasama dengan PLN dan akan terus mendukung PLN jika dibutuhkan, sesuai dengan SOA.

3. Rekomendasi TIAP: BP harus siap memulai program restorasi perumahan untuk desa-desa di pesisir pantai utara apakah konstruksi Kilang 3 dimulai pada tahun 2016 atau tidak.

Tanggapan BP: Rencana Restorasi Perumahan Pesisir Pantai Utara tetap berlangsung. Kami setuju bahwa program ini dapat mengatasi masalah kecemburuan di Pesisir Pantai Utara yang selalu ada.

Tangguh akan mendukung proyek yang akan dipimpin oleh pemerintah Kabupaten Bintuni. Kami meyakini bahwa bekerjasama dengan pemerintah setempat dalam proyek ini merupakan pendekatan terbaik untuk memastikan keterlibatan masyarakat. Kami akan melanjutkan persiapan dan mempertimbangkan setiap perubahan rencana pada waktunya.

4. Rekomendasi TIAP: Komitmen BP untuk mendirikan sekolah unggulan di Teluk Bintuni untuk siswa yang paling menjanjikan tidak boleh ditunda lagi.

Tanggapan BP: Setuju. Kami telah menyelesaikan penilaian kesenjangan untuk Sekolah Tanah Merah Baru untuk memahami lingkup dan skala yang dibutuhkan untuk memenuhi standar sekolah unggulan. Kami juga telah memasukkan aktivitas yang terkait dengan sekolah unggulan dalam aktivitas 2016 kami yang direncanakan akan memajukan program ini.

Kami meyakini bahwa sekolah unggulan harus benar-benar sesuai dengan budaya Papua dan Bintuni. Karena itu, persiapan dan konsep awal merupakan aspek penting untuk mengembangkan sekolah unggulan. Hal ini akan dilakukan secara serius dan melalui koordinasi dengan pemerintah setempat.

5. Rekomendasi TIAP: BP harus terus mengajarkan pemangku kepentingan setempat bahwa kompensasi adat harus muncul dari bagi hasil dan untuk saat ini menjadi tugas pemerintah daerah untuk mewujudkannya.

Tanggapan BP: Setuju. Kami terus melakukan advokasi mengenai masalah ini dengan terus melakukan pelibatan secara formal dan informal. Kami telah bertindak proaktif dalam memberikan advokasi mengenai masalah ini dengan pemerintah pusat, termasuk dengan Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Departemen Keuangan. Diskusi serta advokasi dengan pemerintah setempat juga terus dilaksanakan.

Secara bersamaan, kami terus menyelenggarakan setidaknya dua lokakarya setiap tahunnya dengan pemerintah pusat dan daerah untuk membahas pengelolaan adat dan pengelolaan pendapatan dari industri ekstraktif sebagai bagian dari Program Tata Kelola Tangguh.

6. Rekomendasi TIAP: BP tidak boleh membuat perubahan apa pun dalam kebijakan transportasi pekerja setempat sebelum berkonsultasi dengan pekerja dan pemimpin pemerintahan setempat untuk menjajaki berbagai pilihan.

Tanggapan BP: Tangguh telah menunda rencana setelah berkonsultasi dengan pekerja dan masyarakat setempat. Kami tengah melakukan penilaian untuk memahami kelayakan, dampak dari perubahan ini pada pekerja dan masyarakat, serta cara mendukung rencana pemerintah setempat untuk membangun sistem taksi air.

7. Rekomendasi TIAP: Perekrutan pekerja asal Papua yang terampil, serta retensi dan promosi warga asal Papua, harus menjadi fokus manajemen senior, yang harus bertanggung jawab atas keberhasilannya. Manajer harus melakukan pertemuan secara berkala dengan perwakilan pekerja asal Papua.

Tanggapan BP: Setuju. Pengembangan warga Papua secara rutin didiskusikan dalam Forum Kemampuan Operasi Tangguh dan kami mengimplementasikan program penarikan karyawan berpotensi tinggi dengan fokus pada para pekerja asal Papua. VP SDM Asia Pasifik menjadi koordinator kegiatan ini dan bekerja sama dengan VP Operasional Asia Pasifik serta Regional President kami untuk memajukan upaya ini.

Mengingat hampir 70% staf Tangguh berasal dari perusahaan kontraktor, manajemen juga sedang dalam proses untuk mengubah strategi kontraktor untuk menyertakan bahasa kontrak yang lebih jelas yang mengharuskan perusahaan kontraktor untuk melaksanakan pengembangan warga Papua dan membangun tata kelola untuk melacak kemajuannya.

8. Rekomendasi TIAP: Komunikasi dengan anggota DPRD setempat dan MRP, yang memainkan peran penting dalam pemerintahan Papua, harus ditingkatkan dan dilakukan secara berkala.

Tanggapan BP: Setuju. Anggota DPR provinsi Papua Barat dilantik pada tahun 2014 dan sejak saat itu telah bersengketa untuk menunjuk pimpinan DPR.

Selain peningkatan keterlibatan, kami melaksanakan lokakarya dengan anggota DPR di tingkat provinsi dan bupati pada bulan September 2015. Kami akan terus melibatkan, serta menyelenggarakan lokakarya tahunan secara formal dengan para legislator.

9. Rekomendasi TIAP: Pemeliharaan pusat administrasi dan asrama di Tangguh telah diabaikan atau ditangguhkan. BP harus meninjau kembali upaya pemeliharannya dan memberlakukan standar yang lebih tegas pada personel dan kontraktornya.

Tanggapan BP: Keselamatan dan perawatan kilang LNG Tangguh merupakan prioritas kita untuk memastikan operasi yang aman dan andal. Fasilitas non-hidrokarbon seperti asrama dan gedung administrasi telah mematuhi standar kesehatan, keamanan dan kebersihan dengan pemeriksaan pembersihan secara reguler. Masalah kecil di fasilitas non-hidrokarbon diperbaiki jika perlu. Kami membedakan cacat perawatan dan kosmetik dan hanya penilaian teknis yang dapat membedakan keduanya. Data BP menunjukkan bahwa pusat administrasi dan asrama dirawat sesuai dengan praktik industri yang umum untuk jenis layanan seperti ini.

10. Rekomendasi TIAP: Logo Tangguh harus digunakan lebih luas lagi untuk mendidik penduduk setempat mengenai apa yang diperoleh dari program yang didukung oleh Tangguh.

Tanggapan BP: Setuju. Kami akan meningkatkan upaya untuk memasukkan logo Tangguh dan SKKMigas di dalam aktivitas-aktivitas kami.

11. Rekomendasi TIAP: BP harus terus berkomitmen pada sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai status hijau dan akhirnya emas dalam tinjauan lingkungannya. Perusahaan juga harus terus berusaha untuk mengurangi pembakaran gas alam.

Tanggapan BP: BP tengah mengevaluasi persyaratan untuk mencapai status Hijau dan Emas dan menilai kecepatan dan waktu untuk memenuhinya. BP terus mencari peluang untuk mengurangi pembakaran gas alam seperti perubahan untuk mengganti rute gas dari seal kompresor gas kering dari sistem pembakaran ke sistem bahan bakar.

B. Keamanan dan Hak Asasi Manusia

12. Rekomendasi TIAP: BP harus mencegah perubahan pada ICBS, atau perubahan dalam perjanjian JUKLAP/PAMBERS dengan polisi selama periode saat ini. Jika diperlukan, BP harus meminta bantuan dari SKKMigas, Kapolda di Provinsi Papua dan lain-lain untuk mempertahankan JUKLAP/PAMBERS hingga tahun 2019.

Tanggapan BP: Setuju, karena ICBS merupakan penopang falsafah keamanan Tangguh selain tindakan perlindungan fisik yang kokoh.

SKKMigas dan Polda Papua Barat secara terus menerus mengupayakan prinsip dan prosedur yang terkait dengan ICBS dalam JUKLAP PAM HULU MIGAS. Tangguh terus mengukur dinamika lingkungan operasi keamanan di sekitar Tangguh, yang dapat meningkatkan ICBS serta tindakan perlindungan fisik

13. Rekomendasi TIAP: BP harus menyediakan akses yang wajar ke dan, jika diminta, menjadwalkan kunjungan oleh Kapolda dan perwira polisi lainnya ke Tangguh, namun harus menolak setiap kehadiran polisi secara permanen di lokasi LNG atau di desa-desa terdekat

Tanggapan BP: Setuju bahwa menjaga hubungan yang membangun dengan penegak hukum merupakan tujuan penting karena terkait dengan keamanan Tangguh. Posisi ini diwujudkan dengan menerima kunjungan jajaran pimpinan Polda seperti yang diminta.

Sebagai pihak yang menandatangani Prinsip-Prinsip Sukarela Untuk Keamanan dan HAM, BP secara bertanggung jawab mengelola hubungannya dengan pemerintah setempat di dalam batas-batas yang didukung dan mematuhi hukum dan peraturan setempat.

ICBS telah dipuji oleh pemangku kepentingan internal dan eksternal sebagai strategi keamanan pilihan mengingat lingkungan tempat beroperasi kami dan mempertimbangkan kearifan lokal. Bidang-bidang yang perlu diperbaiki terus diidentifikasi untuk memastikan bahwa ICBS secara bertanggung jawab berada pada posisi untuk mengatasi berbagai dinamika keamanan yang terus berubah.

14. Rekomendasi TIAP: Fokus BP dengan komando polisi yang baru harus diletakkan pada familiarisasi dan implementasi prinsip-prinsip ICBS dari JUKLAP / PAMBERS, termasuk tiga lingkaran keamanan, pelatihan hak asasi manusia untuk semua keamanan swasta dan polisi yang dapat dipanggil dan pelatihan tahunan dengan keikutsertaan polisi secara penuh.

Tanggapan BP: BP menerima dengan tangan terbuka pembentukan komando polisi yang baru di Manokwari karena hal tersebut akan meningkatkan keterkaitan antara Tangguh dan aparat penegak hukum. SKKMigas and Polda Papua Barat secara terus menerus mengupayakan prinsip dan prosedur yang terkait dengan ICBS dalam JUKLAP PAM HULU MIGAS.

Komitmen kami terhadap Latihan Keamanan Bersama dengan Polda sudah jelas. Kami telah melaksanakan latihan tahunan sejak tahun 2007 kecuali tahun 2009 dan 2015 yang harus ditunda sehubungan dengan adanya perubahan prioritas keamanan pada Pilkada. Namun demikian, pelatihan internal VPHSR merupakan kegiatan yang terus dilaksanakan, dan terakhir diselenggarakan pada Kuartal 3 tahun 2015 dan melibatkan satuan polisi di Manokwari, Bintuni (juga dengan TNI), Babo, Fakfak, Aranday, dan Kokas.

Latihan Keamanan Bersama ini tidak hanya dihadiri oleh Polisi dan BP, namun juga melibatkan pejabat pemerintah setempat, TNI, LSM dan media sebagai pengamat independen.

Sebagai pihak yang menandatangani Prinsip-Prinsip Sukarela Untuk Keamanan dan HAM (VPSHR), BP secara bertanggung jawab mengelola hubungannya dengan pemerintah setempat di dalam batas-batas yang didukung dan mematuhi hukum dan peraturan setempat.

15. Rekomendasi TIAP: Jika dan ketika komando TNI yang baru dibentuk di Papua Barat atau Teluk Bintuni, komunikasi dan edukasi dengan pemimpinnya mengenai ICBS harus menjadi prioritas BP.

Tanggapan BP: Kami setuju bahwa menjaga hubungan yang membangun dengan aparat keamanan merupakan tujuan penting karena terkait dengan keamanan Tangguh.

Jika dan ketika komando TNI yang baru dibentuk di lokasi terdekat, BP akan memprioritaskan keterlibatannya dengan lembaga dan pimpinannya berdasarkan manfaat dan fitur ICBS, termasuk kecocokannya di dalam kerangka perlindungan obyek vital nasional strategis.

Sebagai pihak yang menandatangani Prinsip-Prinsip Sukarela Untuk Keamanan dan HAM, BP secara bertanggung jawab mengelola hubungannya dengan pemerintah setempat di dalam batas-batas yang didukung dan mematuhi hukum dan peraturan setempat.

16. Rekomendasi TIAP: Komunikasi yang rutin harus dilakukan dengan BIN, mereka harus diundang untuk memantau latihan gabungan tahunan dan mengunjungi Tangguh. Akan tetapi, setiap permintaan kepada BP untuk mendukung aktivitas Intel reguler atau permanen di lokasi LNG atau di desa sekitar harus ditolak.

Tanggapan BP: Setuju bahwa menjaga hubungan yang reguler dan membangun dengan BIN, di tingkat provinsi dan nasional, merupakan tujuan penting karena terkait dengan keamanan Tangguh.

Sejauh ini terjalin hubungan yang positif antara BIN dan BP. BIN telah berpartisipasi dalam dua Latihan Keamanan Gabungan terakhir di Tangguh sebagai pengamat independen bersama-sama dengan pejabat pemerintah daerah, TNI, Media, dan LSM. Terlebih lagi, dalam beberapa kesempatan, BP telah berpartisipasi dalam sesi berbagi di markas BIN di Jakarta untuk mendiskusikan masalah-masalah seperti keamanan umum dan ICBS.

Sebagai pihak yang menandatangani Prinsip-Prinsip Sukarela Untuk Keamanan dan HAM, BP secara bertanggung jawab mengelola hubungannya dengan pemerintah setempat di dalam batas-batas yang didukung dan mematuhi hukum dan peraturan setempat.

ICBS telah dipuji oleh pemangku kepentingan internal dan eksternal sebagai strategi keamanan pilihan mengingat lingkungan tempat beroperasi kami dan mempertimbangkan kearifan lokal. Bidang-bidang yang perlu diperbaiki terus diidentifikasi untuk memastikan bahwa ICBS secara bertanggung jawab berada dalam posisi untuk mengatasi berbagai dinamika keamanan yang terus berubah. Ini mencakup, namun tidak terbatas pada berbagi informasi dengan pihak yang berwenang.

17. Rekomendasi TIAP: BP juga harus menekankan komunikasinya dengan pemangku kepentingan eksternal, terutama para pejabat keamanan publik yang merupakan bagian penting dari ICBS yaitu menjaga hubungan baik dengan masyarakat di sekitar proyek berdasarkan saling menghormati.

Tanggapan BP: Setuju. Komitmen kami terhadap ICBS sudah jelas; sehingga komunikasi kami dengan pihak yang berwenang yang terkait dengan menjaga hubungan yang positif dengan masyarakat sekitar berdasarkan saling menghormati harus mencerminkan komitmen ini

18. Rekomendasi TIAP: BP harus terlibat langsung dengan Genting dalam urusan pengaturan keamanan, menawarkan untuk membagikan pengalamannya dengan ICBS dan mengundang pejabat keamanan Genting untuk memantau latihan gabungan tahunan; BO juga harus terus meminta SKKMigas dan pihak-pihak lain untuk mendorong Genting agar tidak menggunakan TNI atau polisi untuk keamanan di lokasi.

Tanggapan BP: BP baru-baru ini telah membuat kemajuan penting dalam membagikan pengalaman ICBS kami dan komitmen terhadap VPSHR dengan pemangku kepentingan eksternal utama termasuk SKKMigas, Polda Papua Barat, dan perusahaan-perusahaan minyak dan gas lainnya (termasuk Genting) dengan kehadiran bisnis di provinsi Papua Barat.

Saat ini BPK bekerja sama dengan pemangku kepentingan eksternal tersebut untuk membuat JUKLAP PAM HULU MIGAS, yang secara prosedur akan mengatur sifat, tingkat, dan mekanisme pembayaran yang terkait dengan penyediaan layanan keamanan oleh pihak yang berwenang. Yang menjadi jantung dari instrumen hukum ini adalah komitmen terhadap prinsip-prinsip ICBS dan VPSHR.

C. Listrik dan Daya

19. Rekomendasi TIAP: Melalui koordinasi dengan SKKMigas dan bekerja sama dengan PLN, BP harus membuat tahapan jadwal memperluas jaringan listrik untuk setiap desa yang memiliki infrastruktur.

Tanggapan BP: Perusahaan listrik milik negara (PLN) sebagai distributor listrik satu-satunya di Indonesia telah mengembangkan rencana untuk menyediakan listrik di kabupaten Teluk Bintuni.

Tangguh mendukung upaya PLN seperti yang diatur di dalam perjanjian Kesepakatan Pembelian Produksi dan akan terus bekerja sama dengan PLN dalam mewujudkannya.

20. Rekomendasi TIAP: Di daerah di mana PLN masih harus membangun jaringan listrik, BP harus menambah dukungan kapasitas pembangkit diesel sehingga paling tidak fasilitas umum seperti sekolah dan klinik kesehatan dapat mengandalkan daya listrik yang terus tersedia secara memadai.

Tanggapan BP: Prinsip AMDAL kami yang baru adalah bekerja sama dengan pemangku kepentingan dalam program pembangunan kami. Kami kini sedang dalam tahap “bekerja dengan” pemerintah di mana masyarakat harus berperan lebih besar dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk kesehatan, pendidikan dan listrik.

Menyediakan dukungan sementara tersebut dapat meningkatkan ketergantungan dan harapan yang harus disediakan Tangguh dalam jangka panjang. Kami meyakini bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk mendukung sebagian besar layanan dasar ini dan akan terus membangun kemampuan dan fokus untuk memberikan bantuan darurat jika diperlukan.

21. Rekomendasi TIAP: BP harus bekerja sama dengan SKKMigas untuk memastikan bahwa LNG dapat disediakan untuk membangkitkan listrik untuk rakyat Papua segera setelah secara teknis dan secara hukum memungkinkan; BP harus menyediakan atau mensponsori dukungan teknis untuk mempercepat pembangunannya.

Tanggapan BP: Setuju. Menteri ESDM telah menerbitkan Surat Alokasi LNG untuk Provinsi Papua Barat (termasuk Teluk Bintuni dan Kabupaten Fakfak) untuk kebutuhan listrik di Kawasan Papua pada tanggal 18 Juni 2014. Sampai dengan 0,16 mtpa LNG atau setara dengan 20 mmscf/d gas akan tersedia untuk dijual dari LNG Tangguh ke BUMD. Dalam rancangan Proyek Pengembangan Tangguh, kami juga menyertakan dermaga LNG mini sebagai bagian dari cakupan untuk mengakomodasi rencana ini.

Kami bekerja sama dengan SKKMigas dan ESDM untuk mewujudkan inisiatif Gas menjadi Listrik ini terutama untuk memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki infrastruktur yang dibutuhkan pada waktu yang sama saat Proyek Pengembangan Tangguh dimulai.

D. Perumahan Pesisir Pantai Utara

22. Rekomendasi TIAP: BP harus meminta dukungan dari SKKMigas dan Bupati baru yang untuk memulai program restorasi perumahan pesisir pantai utara pada tahun 2016, jika perlu, meskipun keputusan pengembangan Tangguh ditangguhkan. BP juga menjajaki pengembangan program, seiring waktu, ke desa-desa pesisir pantai utara lainnya. Rencana restorasi Perumahan Pesisir Pantai Utara masih berlangsung dan kami setuju bahwa program ini akan mengatasi masalah kecemburuan daerah Pesisir Pantai Utara yang terus berlangsung.

Tanggapan BP: Tangguh akan mendukung proyek yang akan dipimpin oleh pemerintah Kabupaten Bintuni. Kami meyakini bahwa bekerja sama dengan pemerintah setempat merupakan pendekatan terbaik untuk memastikan keterlibatan masyarakat dan pemerintah setempat. Kami akan melanjutkan persiapan dan akan mempertimbangkan lebih lanjut setiap perubahan rencana pada waktunya.

E. Ketenagakerjaan Masyarakat Papua

23. Rekomendasi TIAP: Perekrutan masyarakat Papua harus menjadi tanggung jawab inti dari seorang manajer senior. Metrik interim juga harus dibuat, sekurang-kurangnya setiap tahun, untuk mengukur kemajuan setiap komponen dan menyesuaikannya jika target tidak tercapai.

Tanggapan BP: Setuju. Wakil Presiden (VP) Sumber Daya Manusia telah ditugaskan untuk mengoordinasikan Program Pembangunan Masyarakat Papua dan memantau kemajuannya, meskipun hak memutuskan perekrutan dan pemekerjaan berada di tangan masing-masing VP. Metrik kemajuan ini akan membantu mengukur dan memfokuskan program.

Perlu juga ditekankan bahwa kami berusaha untuk mencapai target 85% tenaga kerja asal masyarakat Papua sebelum tahun 2.029. Akan tetapi, hal ini tidak sepenuhnya akan tercapai melalui perekrutan. Seiring dengan upaya untuk mengoptimalkan dan mengefisienkan operasi kami, pengurangan personel non-Papua di lokasi juga akan menjadi sarana untuk mencapai target sebesar 85%.

24. Rekomendasi TIAP: Retensi dan promosi karyawan asal Papua juga harus menjadi tanggung jawab pimpinan BP, mungkin Wakil Presiden bagian Sumber Daya Manusia atau manajer lokasi untuk Tangguh. Metrik spesifik harus diterapkan untuk mengukur kinerja, dan manajemen senior harus bertanggung jawab. Semua manajer senior harus diminta menjadi mentor atau pembimbing teknis bagi karyawan warga Papua. Semua manajer lainnya juga harus didorong untuk melakukannya, dan diberikan penghargaan jika dapat melakukannya secara efektif.

Tanggapan BP: Setuju. Wakil Presiden bagian Sumber Daya Manusia ditugaskan untuk mengoordinasikan Program Pembangunan Warga Papua dan untuk memantau kemajuannya. Metrik kemajuan ini akan membantu mengukur dan memfokuskan program.

Program pembangunan terstruktur telah dilaksanakan sejak awal tahun 2015 untuk lebih meningkatkan nasionalisasi dan program pembangunan masyarakat Papua di Tangguh LNG.

Untuk saat ini, tim Operasi memperkenalkan Program Perkembangan Kepemimpinan Tangguh yang menekankan pembinaan dan pembimbingan. Manajer senior Organisasi Operasi Global (GOO) telah secara terbuka menawarkan peluang pembimbingan bagi staf warga Papua dan akan terus mendukung dan mendorong staf untuk memanfaatkan tawaran itu.

Kami juga membuat target kontrak kinerja bagi para manajer dalam pembangunan Papua dan kami melaksanakan evaluasi akhir tahun yang terstruktur dan identifikasi bakat untuk membantu menunjuk orang-orang yang siap dipromosikan berdasarkan prestasi mereka. Kami hanya akan mempromosikan orang yang siap dan memiliki kemampuan teknis dan kepemimpinan untuk menjalankan pabrik yang memiliki risiko bahaya yang tinggi.

25. Rekomendasi TIAP: Komunikasi pihak manajemen dengan karyawan warga Papua harus ditingkatkan dan dibuat secara teratur. Pekerja asal Papua di Tangguh, atau kelompok perwakilan yang ditunjuk, harus bertemu secara teratur dengan manajer senior BP yang bertanggung jawab untuk mempertahankan dan mempromosikan karyawan warga Papua

Tanggapan BP: Setuju. Pimpinan bagian operasional melaksanakan pertemuan townhall setiap kuartalnya dan rapat tim kecil untuk mengomunikasikan berita terbaru, termasuk tentang Pembangunan Warga Papua.

Wakil Presiden bagian Operasional telah membuat sebuah komite pengarah Papua untuk mendorong pengembangan warga Papua lebih lanjut dan menilai kebutuhan jajaran di garis depan.

26. Rekomendasi TIAP: Jika dapat dilakukan, karyawan asal Papua dari kontraktor utama yang melayani Tangguh harus juga disertakan dalam komunikasi ini agar BP dapat lebih memahami kesulitan kontraktornya dalam melaksanakan retensi dan promosi karyawan warga Papua.

Tanggapan BP: Setuju. Kami sedang mengimplementasikan beberapa perbaikan dalam strategi kontrak kami, dalam batas-batas dan lingkup peraturan pemekerjaan bersama, termasuk:

- Penguatan dalam naskah klausul kontrak untuk menegakkan implementasi program pembangunan dan meningkatkan target pemekerjaan warga Papua;
- Memperpanjang jangka waktu kontrak menjadi 5 tahun yang menyediakan lebih banyak waktu bagi kontraktor untuk mencapai program; dan,

- Melatih manajemen kontrak yang bertanggung jawab untuk mengelola kinerja kontraktor dalam hal Pembangunan warga Papua.

F. Perawatan Kesehatan

27. Rekomendasi TIAP: BP harus terus mendukung kemampuan kantor kesehatan kabupaten, agar klinik kesehatan (Puskesmas) dapat melayani desa-desa di pesisir pantai utara dan selatan. BP harus menjelaskan kepada Bupati baru mengenai kesediaannya untuk terus mendukung peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan di kabupaten.

Tanggapan BP: Setuju. Sudah menjadi bagian dari komitmen AMDAL kami untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan dan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola dan menyediakan layanan kebutuhan dasar. Kami meyakini bahwa kesinambungan kesehatan yang terbaik akan tercapai dengan cara ini dimana pemerintah daerah menjadi pihak yang terdepan dan Tangguh terus mendukung melalui pembangunan kemampuannya.

G. Pendidikan

28. Rekomendasi TIAP: Pendirian sekolah unggulan pertama di Teluk Bintuni harus menjadi prioritas pendidikan BP dengan target tahun 2016.

Tanggapan BP: Setuju. Kami telah menyelesaikan penilaian kesenjangan untuk Sekolah Tanah Merah Baru untuk memahami lingkup dan skala yang dibutuhkan untuk memenuhi standar sekolah unggulan. Kami juga telah memasukkan aktivitas yang terkait dengan sekolah unggulan dalam aktivitas 2016 kami yang direncanakan akan memajukan program ini.

Kami meyakini bahwa sekolah unggulan harus benar-benar sesuai dengan budaya Papua dan Bintuni. Karena itu, persiapan dan konsep awal merupakan aspek penting untuk mengembangkan sekolah unggulan. Hal ini akan dilakukan secara serius dan melalui koordinasi dengan pemerintah setempat.

H. Pengembangan Usaha Warga Papua

29. Rekomendasi TIAP: BP harus mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pembelian pertanian dan perikanan setempat menjadi 65% dari kebutuhan operasional Tangguh, terlepas dari apakah konstruksi Kilang 3 dimulai pada tahun 2016 atau tidak.

Tanggapan BP: Setuju. Kami telah berkomitmen dalam AMDAL untuk meningkatkan pembelian pertanian dan perikanan setempat menjadi 65% untuk kebutuhan operasional Tangguh. Program ini terbukti sangat efektif dalam membangun rasa kepemilikan dari masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan rakyat setempat.

Tangguh akan terus memfokuskan pada pengembangan usaha lokal warga Papua dengan penekanan pada area strategi pertumbuhan diversifikasi untuk menciptakan efek perluasan yang lebih besar.

30. Rekomendasi TIAP: Grup Manajemen Pengadaan dan Rantai Suplai di Tangguh harus mengidentifikasi produk atau jasa yang berpotensi memenuhi kualifikasi pengadaan non-kompetitif dan menyampaikan hasilnya secara luas sehingga usaha warga Papua dapat difokuskan untuk melayani kebutuhan ini.

Tanggapan BP: Program Pengembangan Usaha Masyarakat Asli (IEDP) dan tim Manajemen Pengadaan dan Rantai Suplai (PSCM) melakukan penilaian di tahun 2015 mengenai produk-produk yang berpotensi untuk aktivitas non-hidrokarbon di Tangguh Akan tetapi, karena strategi sosial kami berubah menjadi pengurangan ketergantungan masyarakat pada Tangguh, tim IEDP tidak akan menempatkan Tangguh sebagai satu-satunya pasar untuk program ekonomi setempat. Kami akan

terus mengembangkan kemampuan Masyarakat Asli (IP) setempat dan meningkatkan daya saing mereka untuk memastikan produk dan layanan mereka akan diterima secara luas di pasar setempat, termasuk Tangguh. Pendekatan ini akan mendukung keberlanjutan.

31. Rekomendasi TIAP: BP harus terus mendukung Layanan Pengembangan Usaha (BDS) dalam usahanya menciptakan lebih banyak usaha yang dijalankan oleh Masyarakat Asli di Bintuni dan kota-kota lain di wilayah ini namun harus menekankan pelatihan dan pembimbingan bagi Masyarakat Asli untuk menghindari ketergantungan jangka panjang pada BP.

Tanggapan BP: Setuju. Ini merupakan bagian dari AMDAL kami untuk fokus pada Masyarakat Asli dan juga untuk mengurangi kemungkinan peminggiran. Mendukung BDS untuk menambah usaha yang dijalankan oleh Masyarakat Asli, melatih dan membimbing usaha ini tidak hanya akan membantu meningkatkan kualitas hidup pemilik usaha dan keluarganya, namun juga penting untuk keberlanjutan usaha.

Lampiran A. Status rekomendasi TIAP

REKOMENDASI TIAP MULAI KUNJUNGAN MARET 2014

Status Desember 2015

Topik	Masalah dan risiko yang diidentifikasi dalam kunjungan TIAP	Tanggapan BP bulan April 2014	Rencana tindakan dan status
Keamanan dan hak asasi manusia	<p>1. Sebagai bagian dari proses pembaruan JUKLAP (Petunjuk Lapangan), sosialisasi Program Keamanan Terintegrasi Berbasis Masyarakat (ICBS) harus ditingkatkan, terutama terkait perlunya pembatasan penangkapan ikan.</p>	<p>Kami setuju denan rekomendasi ini. Sosialisasi ICBS dijalankan di kampung-kampung yang terkena dampak langsung (kampung DAV) setidaknya setahun sekali. Kami akan mengintensifkan aktivitas ini dan akan menyertakan kampung-kampung lain seiring peningkatan kegiatan Proyek Pengembangan Tangguh di wilayah teluk.</p> <p>Kami juga memperkuat program ICBS agar lebih sistematis dengan pendekatan berbasis proses serta KPI yang jelas. Untuk meningkatkan kinerja ICBS, kami harus melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal seperti masyarakat dan aparat pemerintah. Mereka akan memberikan masukan dan umpan balik terkait harapan dan kontribusi mereka yang nantinya sangat penting untuk mengembangkan peta jalan program ICBS yang lebih sistematis dan efektif. Guna memastikan keberlanjutan program ICBS di tempat kami beroperasi, ICBS harus diperkenalkan kepada dan diterima oleh industri serupa di Papua pada umumnya, dan Papua Barat pada khususnya, serta didukung lembaga</p>	<p>Ini merupakan kegiatan yang terus menerus dilaksanakan.</p> <p>Sosialisasi ICBS mencakup kesadaran hukum dan zona pengecualian (pembatasan daerah penangkapan ikan) dilaksanakan secara rutin di beberapa desa di sekitar proyek Tangguh. Sesi kesadaran hukum yang terakhir dilakukan di desa Babo, TMB dan Saengga selama bulan Oktober-November 2015 bekerja sama dengan Polda Papua Barat; Lebih dari 130 orang yang berpartisipasi termasuk tokoh masyarakat.</p> <p>Selain itu, evaluasi pelaksanaan ICBS telah diselesaikan pada akhir Kuartal 3-2014 oleh LP3BH. Evaluasi ini melibatkan perwakilan masyarakat dan pemangku kepentingan utama di Bintuni dan Fakfak. Penilaian ini menampilkan program ICBS dan mengukur persepsi pemangku kepentingan mengenai manfaatnya. Penilaian ini akan membantu Tangguh dalam merancang ulang meningkatkan kinerja ICBS di masa depan di masa depan, sembari tetap sejalan dengan JUKLAP.</p> <p>BP melanjutkan usahanya memengaruhi berbagai</p>

Topik	Masalah dan risiko yang diidentifikasi dalam kunjungan TIAP	Tanggapan BP bulan April 2014	Rencana tindakan dan status
		pemerintahan terkait.	<p>pihak untuk melaksanakan ICBS sebagai strategi untuk mengamankan proyek-proyek industri minyak dan gas, termasuk melalui sesi berbagi dengan operator lain seperti Inpex Masela, Ltd dan Talisman, di tahun 2014. BP selama tahun 2015 telah memanfaatkan peluang untuk membagikan praktik terbaiknya mengenai implementasi ICBS dan konsep VPHSR dengan berbagai audiens dalam beberapa forum, termasuk diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forum Pimpinan Keamanan PSC Senior, yang difasilitasi oleh SKK Migas - Juni 2015 • Rapat di BIN (Badan Intelijen Nasional) - Juni 2015 • Simposium Kementerian Luar Negeri mengenai UNGP Bisnis & Hak Asasi Manusia - September 2015
	<p>2. Harus ada latihan tahunan bagi personel keamanan terkait penggunaan pentungan atau perangkat lain yang dapat menyebabkan cedera.</p>	<p>Kami setuju. Personel keamanan kami dan aparat kepolisian lokal telah mendapat pelatihan penggunaan pentungan dalam berbagai latihan keamanan seperti, Latihan Bersama, pelatihan swakarnya mengenai Prinsip-Prinsip Sukarela Untuk Keamanan dan HAM (VPSHR), dan pelatihan personel keamanan khusus.</p> <p>Baru-baru ini kepolisian Papua mengabarkan bahwa akan ada peraturan kepolisian nasional yang melarang personel keamanan swasta</p>	<p>Sesuai dengan peraturan polisi yang baru, kami tidak menggunakan pentungan selama pelatihan personel keamanan.</p>

Topik	Masalah dan risiko yang diidentifikasi dalam kunjungan TIAP	Tanggapan BP bulan April 2014	Rencana tindakan dan status
		menggunakan pentungan. Kami segera menarik pentungan dari personel keamanan kami dan akan menyesuaikan pelatihan kami.	
	3. Pangdam (Komandan TNI Militer Papua) harus didorong untuk melanjutkan pelatihan hak asasi manusia bagi pasukan TNI yang akan dikerahkan ke Tangguh bila terjadi keadaan darurat.	Kami setuju. Pasukan TNI dan polisi di Bintuni mendapatkan pelatihan hak asasi manusia tahunan. Kami akan meneruskan pelatihan ini. Untuk memastikan keberlanjutan program ini, kami senantiasa berkomunikasi dengan Pangdam Papua dan Komandan Militer di Sorong.	Karena jadwal yang bentrok, pelaksanaan pelatihan hak asasi manusia tahun 2014 ditunda. Kami telah berhasil melaksanakan pelatihan hak asasi manusia pada bulan Oktober 2015 di kota Kokas dan Fakfak yang melibatkan 20 orang polisi.
	4. BP harus bekerja sama dengan kepolisian untuk menjadikan latihan bersama tahunan sebagai simulasi yang lebih realistis. Latihan bersama juga harus terus digelar terpisah dari latihan hak asasi manusia atau kegiatan lain.	<p>Latihan bersama bertujuan memberikan simulasi kegiatan bagi Polsek dan Polres terkait JUKLAP dan panduan hak asasi manusia melalui sebuah simulasi yang harus mereka Setelah Latihan Bersama, kami biasanya membahas pelajaran yang dipetik dengan semua peserta dan menyampaikan apa yang telah berjalan dengan baik dan apa yang belum dengan maksud perbaikan yang berkelanjutan. Sebelum melaksanakan Latihan Bersama tahun ini, kami mendiskusikan agenda dan skenario simulasi dengan polisi dan memperoleh umpan balik sehingga kami dapat melaksanakan hasil latihan bersama yang lebih baik, sesuai tujuan, dan hasil lebih realistis.</p> <p>Tangguh akan terus melaksanakan pelatihan</p>	<p>Latihan keamanan bersama tahunan (JE) berhasil diselenggarakan di Babo dan lokasi Tangguh pada akhir bulan November 2014. Kegiatan ini melibatkan 86 orang termasuk polisi setempat, tentara, dan petugas keamanan Tangguh, dua LSM setempat (LP3BH dan KOMNAS HAM), serta enam wartawan nasional dan lokal.</p> <p>Untuk mengoptimalkan materi pelatihan, Latihan Bersama 2014 ini dipisahkan dari pelatihan HAM internal (IHT). Akan tetapi, cakupan hak asasi manusia tetap menjadi topik agenda di Latihan Bersama.</p> <p>IHT sementara itu dilakukan pada bulan Oktober 2015 yang melibatkan 20 pemangku kepentingan utama keamanan di Kokas dan Kawasan Fakfak. Materi</p>

Topik	Masalah dan risiko yang diidentifikasi dalam kunjungan TIAP	Tanggapan BP bulan April 2014	Rencana tindakan dan status
		<p>internal HAM (IHT) secara terpisah dari Latihan Bersama ini, sebagaimana yang telah kami lakukan sejak kami mulai melakukan IHT dan Latihan Bersama di tahun 2008. Dalam latihan bersama ini, akan ada kelas penyegaran hak asasi manusia. Ini hanya sebagai pengingat dan bukan pelatihan utama. Penyegaran ini bertujuan menyiapkan peserta untuk simulasi sebagai bagian latihan bersama.</p>	<p>pelatihannya mencakup informasi terbaru perkembangan proyek Tangguh, masalah HAM, hukum dan peraturan tentang kekerasan, komunikasi dan keterampilan negosiasi, manajemen bentrokan, pertolongan pertama, konsep ICBS dan program sosial Tangguh.</p>
	<p>5. Sistem pengaduan harus terus disosialisasikan baik di kampung yang terkena dampak atau di kalangan karyawan agar semua dapat memahami dan menggunakannya.</p>	<p>Kami setuju. Kami telah mengadakan sosialisasi sistem pengaduan di desa-desa secara rutin, termasuk di tahun 2013, dan berencana melanjutkannya di tahun-tahun mendatang.</p>	<p>Sosialisasi prosedur pengaduan dilanjutkan di beberapa desa di sekitar Tangguh, menggunakan mekanisme formal dan non-formal. Dengan demikian masyarakat desa memiliki saluran untuk menyampaikan aspirasi mereka dan kekhawatiran yang terkait dengan Tangguh. Tim Hubungan Komunitas juga memastikan formulir keluhan juga tersedia di desa-desa.</p> <p>Selama bulan Januari-November 2015, sosialisasi pengaduan dilakukan di beberapa desa sekitar Tangguh termasuk di TMB, Saengga, Otoweri, dan Onar. Selain itu, sosialisasi informal mengenai prosedur keluhan telah dilakukan selama acara sosial di desa-desa. Ada 99 keprihatinan yang diajukan menggunakan prosedur keluhan dari bulan Januari hingga Oktober 2015. Semua kekhawatiran ini telah ditanggapi dalam batas waktunya.</p>

Topik	Masalah dan risiko yang diidentifikasi dalam kunjungan TIAP	Tanggapan BP bulan April 2014	Rencana tindakan dan status
			Sementara itu sosialisasi keluhan pekerja dilakukan secara terpisah dan melibatkan kontraktor melalui acara orientasi sebelum bekerja. Antara bulan Januari dan September 2015, 13 kekhawatiran telah diterima melalui sistem pengaduan pekerja.
	6. BP harus membatasi dukungannya terhadap kehadiran personel polisi dan TNI di kampung pada komunikasi dan forum publik yang menginformasikan masyarakat mengenai keamanan, hak asasi manusia, dan ICBS.	Kami setuju dan akan melakukannya. Tangguh akan mendukung kehadiran personel polisi dan TNI dalam komunikasi dan forum publik yang terkait langsung dengan fungsi formal mereka dalam ICBS.	Untuk saat ini, dukungan BP kepada Polisi dan TNI masih terbatas. Dukungan yang diberikan hanya terkait dengan pelaksanaan ICBS, misalnya, penguatan Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (FKPM) di Saengga dan TMB, serta aktivitas sosialisasi hukum. Keterlibatan dan kehadiran personel polisi selama aktivitas ini diperlukan untuk memberikan pembimbingan dan penguatan kapasitas bagi anggota masyarakat, agar bisa menyediakan informasi yang terkait dengan hukum dan peraturan.
	7. BP harus memiliki rencana untuk menutup fasilitas jika terjadi serangan dari dunia maya yang berhasil, dan harus mencegah akses ke sistem operasinya kepada pihak eksternal.	Kami telah memiliki prosedur untuk menangani situasi di mana sistem kendali kami tak dapat dijalankan (karena berbagai alasan termasuk serangan maya). Listrik akan dipadamkan dan kilang dimatikan. Tidak ada pihak eksternal yang dapat mengakses sistem operasi kilang. Sistem pengendalian untuk mencegah serangan sudah ada. Sebagai contoh, kami telah memasang firewall yang dijalankan dan dikontrol secara tersentralisasi. Informasi lain tak dapat disebutkan di sini demi alasan keamanan.	Prosedur ini terus berjalan, dan diimplementasikan melalui sistem TI.

Topik	Masalah dan risiko yang diidentifikasi dalam kunjungan TIAP	Tanggapan BP bulan April 2014	Rencana tindakan dan status
Program untuk Desa-Desa yang Terpengaruh Langsung (DAV) dan Teluk Bintuni	<p>1. CAP memberikan bantuan penting dan spesifik bagi desa-desa DAV. Meski CAP akan dihentikan tahun 2014, bantuan dana pengelolaan pengganti bagi desa-desa pesisir pantai yang terkena dampak harus berlanjut.</p>	<p>Kami setuju. Sesuai AMDAL sekarang, program CAP di kampung DAV telah dilaksanakan selama 10 tahun, seperti yang dijanjikan dan akan dihentikan tahun 2014. CAP telah meningkatkan keterampilan masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pengembangan kampung dengan menggunakan dana yang dialokasikan dari Tangguh. Dalam AMDAL baru, kami berencana menggunakan pendekatan berbeda/ Pendekatan ini akan difokuskan pada masyarakat asli yang tinggal di area operasi di sekitar Tangguh yang akan menjadi sasaran dari program ini/ Tangguh mengalokasikan pengganti kontrak pengelolaan dana untuk program-program berbasis masyarakat yang dapat diakses masyarakat. Selain itu, Tangguh juga akan meneruskan perencanaan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat kampung hingga kabupaten.</p>	<p>Kami telah bekerja dengan masyarakat untuk melaksanakan program CAP tersisa yang akan diselesaikan di awal tahun 2016. Program ini telah dilaksanakan di Tofoi, TMB, Saengga, Otoweri, dan Tomage.</p> <p>Saat ini kami bekerja sama dengan UNDP dan pemerintah daerah untuk menemukan pendekatan terbaik bagi masyarakat untuk mengakses pengelolaan dana di awal tahun 2016. Kegiatan ini harus dilakukan menggunakan cara sedemikian sehingga tidak meningkatkan harapan atas program CAP yang baru untuk menghindari kecemburuan atau kesalahpahaman.</p> <p>Dukungan perencanaan partisipatif dalam Musrenbang akan disertakan dalam kontrak tata kelola yang baru di tahun 2016.</p>
	<p>2. Pemukiman, baik baru atau hasil renovasi, di kampung pesisir pantai utara harus jadi prioritas jangka panjang. BP harus mendukung program ini dengan memproduksi kayu dari pohon yang ditebang di</p>	<p>Kami setuju. Tangguh akan mendukung proyek renovasi pemukiman bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni. Kami saat ini tengah bekerja dengan konsultan dari LAP-ITB terkait penilaian dan survei awal. Kami juga memulai proses formal dengan Pemerintah Daerah dan Pusat untuk mengambil kayu dari penebangan pohon TEP (Tangguh Expansion</p>	<p>Proyek Perumahan Pesisir Pantai Utara telah mengalami kemajuan penting, termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diselesaikannya pra-kelayakan untuk mengetahui kondisi sebenarnya dari perumahan dan infrastruktur publik. • BP dan Bupati Teluk Bintuni telah

Topik	Masalah dan risiko yang diidentifikasi dalam kunjungan TIAP	Tanggapan BP bulan April 2014	Rencana tindakan dan status
	kilang LNG.	<p>Project/ Proyek Pengembangan Tangguh) di saat yang tepat agar kayu tersebut dapat digunakan.</p> <p>Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani Bupati Teluk Bintuni dan BP di Bintuni pada tanggal 5 Desember 2013; data dan informasi dasar untuk pra-studi kelayakan tengah dikumpulkan dari masyarakat di Weriagar; dan rapat pertama digelar di Jakarta tanggal 9 Mei 2014 guna menandai pelaksanaan studi kelayakan untuk program Restorasi Pemukiman Pesisir Pantai Utara. Rapat ini dihadiri Bupati serta pejabat senior Kabupaten Teluk Bintuni, SKK Migas, dan BP.</p>	<p>menandatangani Pokok-Pokok Perjanjian (HoA) untuk Program Bantuan Pendanaan Restorasi Perumahan pada tanggal 9 Juni.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT LAPI-ITB juga telah menyelesaikan Laporan Desain Pendahuluan Perumahan untuk menandai tahap pertama dari target Weriagar Housing FEED, termasuk model 3D perumahan, tata letak, dan bagian skema, serta ukuran yang ideal untuk proyek rumah. • Pengumpulan data untuk infrastruktur FED terus dilanjutkan. <p>Beberapa rapat dengan pemangku kepentingan utama termasuk dengan SKKMigas, BPK, dan pemerintah daerah telah dilakukan untuk mengembangkan mekanisme skema kerja sama.</p>
	3. Menyediakan sarana listrik di semua kampung DAV dan Babo harus jadi prioritas utama jangka pendek. Sampai saat PLN bisa memasang jaringan listrik, BP harus mendukung penyediaan listrik temporer berbasis diesel di Babo.	Kami setuju. BP berkoordinasi dengan PLN, Pemerintah Daerah dan UP4B untuk memantau perkembangan distribusi kabel transmisi ke kampung DAV di pesisir pantai selatan dan utara. Kami telah memulai upaya membantu Kabupaten Teluk Bintuni dengan meningkatkan pasokan listrik di wilayah Babo. Rencana jangka pendek kami adalah meminjamkan genset diesel yang akan dioperasikan dan dirawat oleh Kabupaten Teluk Bintuni. Kami harap genset ini dapat mulai menghasilkan listrik dalam beberapa bulan lagi. Rencana jangka panjang kami adalah	<p>PLN masih terus melakukan pemasangan listrik di desa-desa lain-lainnya. Sementara itu, untuk mendukung penyediaan listrik di daerah Babo, Tangguh meminjamkan generator yang dioperasikan dan dirawat oleh pemerintah daerah. Tangguh juga menyediakan bantuan teknis untuk perawatan generator dan untuk memastikan pasokan listrik untuk Babo terus disediakan.</p> <p>Saat ini generator telah berfungsi dengan baik dan menghasilkan daya 12 jam per hari bagi masyarakat</p>

Topik	Masalah dan risiko yang diidentifikasi dalam kunjungan TIAP	Tanggapan BP bulan April 2014	Rencana tindakan dan status
		<p>mendorong PLN untuk memperluas jangkauan listrik (di bawah Kesepakatan Pembelian Produksi Listrik antara PT PLN (Persero) dan Kontraktor KKS, yang ditandatangani pada tanggal 3 Desember 2013) termasuk desa-desa di Kecamatan Babo. Untuk tindakan jangka menengah dan panjang, kami akan berkoordinasi dengan PLN dan Pemda Teluk Bintuni untuk menjajagi cara terbaik untuk mengembangkan jaringan listrik PLN dari gardu PLN dekat Tangguh ke Babo.</p>	<p>Babo.</p>
	<p>4. Seiring perluasan program perawatan kesehatan, BP harus terlebih dahulu fokus meningkatkan kapasitas dan fasilitas di Babo, termasuk kemampuan perawatan gawat darurat, kapasitas personel jangka panjang, dan transportasi gawat darurat ke Bintuni atau tempat lain.</p>	<p>Kami setuju. Kami telah mengidentifikasi beberapa tantangan terkait kesehatan di Babo dan Bintuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai kehamilan berisiko tinggi masih rendah. Dalam banyak kejadian, penduduk lokal merawat pasien kehamilan berisiko tinggi di pusat kesehatan atau bahkan di rumah, padahal seharusnya dibawa ke rumah sakit. • Ketiadaan transportasi yang dapat diandalkan untuk merespons kasus gawat darurat dan rujukan karena ketiadaan pasokan bahan bakar dan buruknya perawatan perahu di Babo dan Bintuni. • Puskesmas Babo, tempat personel dilatih, 	<p>BP masih mendukung pengembangan layanan rujukan darurat untuk kawasan Bintuni melalui kerja sama dengan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni.</p> <p>Selama tahun 2014, BP mengembangkan layanan PONEB di Puskesmas Babo. Program ini bertujuan untuk menyediakan layanan yang lengkap untuk ibu hamil berisiko tinggi dan kelahiran bayi. Dukungan ini termasuk penyediaan infrastruktur dan sarana kesehatan serta penguatan kemampuan bagi penyedia layanan kesehatan. Kami telah melatih tujuh personel dari Puskesmas Babo di Jakarta dan LKKB menyediakan pembimbingan menyeluruh setelah pelatihan dilakukan. Bantuan teknis sampai sekarang terus diberikan.</p> <p>Saat ini, fasilitas telah menjalankan dan memberikan</p>

Topik	Masalah dan risiko yang diidentifikasi dalam kunjungan TIAP	Tanggapan BP bulan April 2014	Rencana tindakan dan status
		<p>masih belum mampu menyediakan tingkat layanan yang diharapkan karena kurangnya rasa percaya diri tim, konstruksi fasilitas yang tengah berjalan, dan ketiadaan peralatan medis (beberapa di antaranya tengah dipesan).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manajemen dan layanan Rumah Sakit Bintuni masih belum dapat menangani kasus gawat darurat kehamilan dan neonatal. • Dinas Kesehatan Kabupaten menyediakan dan mengelola Rumah Singgah di Bintuni. Rumah Singgah ini memberi penampungan sementara bagi wanita dengan kehamilan berisiko tinggi dari semua kampung yang berencana melahirkan di rumah sakit Bintuni. Tingkat hunian fasilitas ini tergolong rendah karena tak dikelola dengan baik. <p>Untuk menjawab tantangan di atas, Tangguh memberi bantuan kepada puskesmas di Babo. Kami meningkatkan kapasitas dan fasilitas Puskesmas Babo agar mereka dapat mengelola kasus obstetri dan neonatal emergensi dasar (PONED), yang diselesaikan di Kuartal 4, 2015. Departemen Kesehatan Masyarakat Tangguh telah membahas transportasi gawat darurat dengan Dinas Kesehatan Kabupaten. Kami diberi tahu bahwa meski Puskesmas Babo</p>	<p>layanan 24 jam untuk wanita hamil dengan kasus-kasus darurat, terutama di desa-desa di wilayah selatan.</p> <p>Belum lama ini, program serupa telah dikembangkan untuk Puskesmas Aranday sehingga dapat menampung masalah-masalah darurat di area pesisir pantai utara. Kami melatih penyedia layanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Aranday pada awal tahun 2015. Bantuan ini akan terus diberikan.</p> <p>Selain itu, tim kesehatan masyarakat Tangguh juga memberikan bantuan teknis bagi RSUD Bintuni agar menjadi pusat rumah sakit rujukan untuk wanita hamil dengan kasus-kasus darurat.</p> <p>Pemerintah setempat telah memprioritaskan masalah kesehatan ibu dan anak dengan menambah oleh alokasi anggaran untuk program ini. Mereka juga telah melaksanakan program PONED untuk Puskesmas Manimeri dan Bintuni, telah sepenuhnya didanai oleh pemerintah daerah.</p> <p>Jelaslah bahwa melalui program Kesehatan Masyarakat ini, strategi 'bekerja dengan' sedang diterapkan. Hal ini akan membantu program Tangguh bersama pemerintah daerah menjadi lebih berkesinambungan.</p>

Topik	Masalah dan risiko yang diidentifikasi dalam kunjungan TIAP	Tanggapan BP bulan April 2014	Rencana tindakan dan status
		<p>sudah memiliki perahu selama beberapa tahun, namun mesinnya mengalami kerusakan. Meski demikian, Dinas Kesehatan Kabupaten baru-baru ini membeli mesin perahu baru untuk Puskesmas Babo dan juga menyediakan anggaran bahan bakar untuk transportasi gawat darurat ke Rumah Sakit Bintuni.</p> <p>Tim kami di Distrik Babo yang dipimpin oleh Manajer Program MCH telah menjalin kerja sama dengan Puskesmas BABO, Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten dan pemangku kepentingan lainnya di Babo. Bersama-sama mereka akan memastikan bahwa puskesmas memiliki kemampuan dan fasilitas untuk menangani kasus PONED serta memastikan bahwa sarana transportasi ke Bintuni telah dirawat dengan baik.</p>	
	<p>5. BP harus terus membangun kapasitas Dinas Pendidikan Kabupaten, mendukung pendidikan dasar di kampung yang terkena dampak, mendukung insentif guna mempertahankan guru andal untuk periode lebih lama, dan memfokuskan kemitraan pendidikan barunya pada pengembangan sekolah</p>	<p>Kami setuju. Program pendidikan kami akan dilanjutkan untuk membantu Dinas Pendidikan Kabupaten menyediakan pendidikan dasar dan menengah di Teluk Bintuni. Hal ini diantaranya: Menyediakan guru dan perumahan mereka, infrastruktur dan fasilitas sekolah, beasiswa dan bantuan pendidikan, pengembangan kemampuan lembaga pendidikan dan mitra pelaksanaan setempat, pelatihan guru dan dukungan untuk sekolah unggulan, asrama, dan</p>	<p>Selama tahun 2015, BP terus memberikan dukungan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Bintuni termasuk diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terus mendukung pengembangan strategi program pendidikan untuk Teluk Bintuni dan Fakfak • Menyediakan beasiswa dan bantuan pendidikan • Meningkatkan kemampuan untuk tiga

Topik	Masalah dan risiko yang diidentifikasi dalam kunjungan TIAP	Tanggapan BP bulan April 2014	Rencana tindakan dan status
	menengah unggulan.	akses internet di sekolah-sekolah	<p>yayasan pendidikan setempat.</p> <p>BP memfasilitasi lokakarya pendidikan pada bulan Desember 2014 dan Januari 2015, dipimpin oleh Kantor Dinas Pendidikan Teluk Bintuni dan Fakfak, serta melibatkan tokoh-tokoh utama pemangku kepentingan pendidikan. Lokakarya ini memberikan rekomendasi dan masukan strategis untuk meningkatkan pendidikan di Teluk Bintuni dan Fakfak, juga menyetujui strategi program pendidikan bagi Tangguh di masa depan.</p> <p>Beasiswa dan bantuan pendidikan untuk pelajar setempat yang terpilih terus berlanjut. Di tahun 2015, 89 pelajar Setempat menerima beasiswa penuh dari Tangguh di tingkat universitas dan sekolah menengah. Sementara itu untuk memperkuat kemampuan universitas setempat, kami telah bermitra dengan UNCEN dan UNIPA melalui beberapa program termasuk program magang guru dan penelitian untuk memenuhi kebutuhan Tangguh.</p> <p>BP juga mendukung alokasi guru tambahan untuk memenuhi kurangnya jumlah guru di pedesaan. Sekarang ini ada 32 guru yang telah direkrut untuk mendukung aktivitas belajar mengajar di sejumlah sekolah di desa-desa di sekitar Tangguh yang terkena dampak.</p> <p>Selain itu, pembangunan sekolah unggulan terus berlangsung. Kami berencana untuk mengembangkan</p>

Topik	Masalah dan risiko yang diidentifikasi dalam kunjungan TIAP	Tanggapan BP bulan April 2014	Rencana tindakan dan status
			sekolah percontohan TMB sebagai basis program sekolah unggulan. Penilaian untuk untuk menentukan kesenjangan telah diselesaikan. Laporan lengkapnya diharapkan keluar di Kuartal 1-2016.
	6. BP harus mengatasi isu pengangkutan stocking point dan pembayaran dengan Indocater dan koperasi di kampung yang membeli dari masyarakat sebelum menjualnya ke Indocater. Jika tidak bisa, BP harus mencantumkan persyaratan untuk mengatasi keluhan ini dalam perpanjangan kontrak.	Kami setuju. Kami akan menyediakan pembimbingan keuangan kepada koperasi. Kami juga akan memfasilitasi dialog antara Indocater dan koperasi serta antara anggota koperasi untuk menyelesaikan perselisihan terkait pengelolaan keuangan, pasokan, atau pembayaran. Termasuk di dalamnya adalah dialog antara Indocater dan koperasi mengenai persyaratan pembayaran kontrak guna mencapai kesepakatan dan kesepakatan bersama demi memastikan perdagangan/transaksi bisnis berkelanjutan melalui program mata pencaharian. Persyaratan agar perusahaan catering menangani keluhan dari masyarakat dapat dicantumkan di kontrak dan Tangguh akan mendukung diskusi jika diperlukan.	<p>Tim mata pencaharian terus memberikan bantuan teknis di pedesaan untuk berpartisipasi dalam program rantai suplai melalui aktivitas stockpoint. Mereka juga memastikan bahwa tidak ada masalah yang terkait dengan utang pembayaran antara Indocater dengan koperasi. Akan tetapi, proses pengambilan produk-produk masyarakat masih menantang karena terbatasnya ketersediaan perahu untuk mendukung program tersebut.</p> <p>Kami telah memfasilitasi perpanjangan kontrak antara beberapa koperasi di pedesaan dengan Indocater untuk menjaga proses pasokan, termasuk membuat penyesuaian harga komoditas yang disuplai.</p> <p>Untuk meningkatkan kemampuan koperasi dalam mengelola usaha, kami melatih anggota koperasi dalam hal aspek pengelolaan bisnis dan aspek keuangan pada bulan April 2015.</p>
	7. Program pengembangan mata pencaharian dan pengelolaan ekonomi rumah tangga harus dilanjutkan untuk jangka panjang agar dapat menghasilkan produk-	Kami setuju. Selain memperluas program mata pencaharian untuk meningkatkan pasar dan produktivitas bagi masyarakat asli, Tangguh juga terus menyediakan pelatihan ekonomi dan pengelolaan dana. Dalam pelatihan kami mempromosikan penggunaan pendapatan	<p>Program pembangunan ekonomi terus berlanjut untuk menyediakan kesempatan bagi masyarakat asli di berbagai program mata pencaharian.</p> <p>Dalam sektor primer, kami memperkuat kemampuan masyarakat dalam bidang perikanan dan pertanian</p>

Topik	Masalah dan risiko yang diidentifikasi dalam kunjungan TIAP	Tanggapan BP bulan April 2014	Rencana tindakan dan status
	<p>produk bernilai tambah. Visi jangka panjang mereka harus diarahkan ke penciptaan perekonomian rumah tangga yang mandiri dan berkelanjutan. Hal ini akan melindungi ekonomi rumah tangga dari dampak buruk dan kumulatif berbagai proyek pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah ini.</p>	<p>rumah tangga secara bijaksana dan kebiasaan menabung. Hal ini sangat penting karena kami berencana meningkatkan partisipasi lokal dalam menyediakan dukungan bagi Tangguh melalui Program Pengembangan Usaha Masyarakat Asli (IEDP) yang akan kian meningkatkan pendapatan mereka.</p>	<p>untuk menjaga suplai produk setempat untuk kebutuhan catering Tangguh, dan untuk kebutuhan pasar setempat. Program ini terus menyediakan bantuan teknis termasuk mengembangkan pasar baru untuk produk-produk mereka di luar desa, serta pelatihan dalam pemrosesan pemanenan produk.</p> <p>Total transaksi dengan stockpoint untuk catering Tangguh sejak bulan Januari hingga November 2015 mencapai lebih dari US\$550.000. Seluruh suplai sejak tahun 2008 adalah sekitar 1.797 ton dengan estimasi nilai lebih dari US \$3,9 juta.</p>
	<p>8. BP harus mendukung bengkel motor atau listrik di tiap kampung DAV jika dibutuhkan.</p>	<p>Kami setuju. Tangguh telah mendukung pelatihan pendirian bengkel mesin di Taroy dan Saengga agar warga kampung dapat memperbaiki perahu motor dan generator listrik mereka sendiri. Kami akan mendukung masyarakat lokal yang tertarik dan memiliki potensi untuk mendirikan bengkel motor atau listrik di desa lain. Hal ini akan jadi bagian dari IEDP yang menyediakan peluang bagi masyarakat Papua untuk meningkatkan keterampilan dan bersaing memperebutkan peluang bisnis di tengah pertumbuhan industri di Bintuni dan Fakfak.</p> <p><i>*Rencana tindakan dan status terbaru untuk rekomendasi 8 digabungkan dengan nomor 7, karena aktivitas-aktivitasnya merupakan bagian dari strategi menyeluruh terkait dengan</i></p>	<p>Program ini memberikan manfaat kepada masyarakat setempat untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga dan kesejahteraan mereka.</p> <p>Untuk memanfaatkan pembangunan ekonomi dan bisnis di Bintuni, serta untuk memenuhi tuntutan Tangguh, program IEDP telah memulai program pembangunan bisnis berskala lebih besar bagi masyarakat asli.</p> <p>Program IEDP melatih 30 perempuan asli dari daerah Bintuni di bidang produksi pakaian di Bandung, Jawa Barat. Selain itu, ada 11 orang warga asli Papua yang telah terlatih servis AC di Jakarta mulai bulan Juni sampai Juli 2015 (40 hari).</p>

Topik	Masalah dan risiko yang diidentifikasi dalam kunjungan TIAP	Tanggapan BP bulan April 2014	Rencana tindakan dan status
		<p><i>pengembangan keterampilan mata pencaharian masyarakat asli, termasuk melalui pelatihan, modal, dan kesempatan khusus.</i></p>	<p>Mereka akan menerima pembimbingan menyeluruh dalam pengembangan bisnis di Bintuni. Akan tetapi belajar dari program lokakarya sepeda, pengembangan usaha Masyarakat Asli merupakan sebuah tantangan dan memerlukan bantuan komprehensif untuk memastikan bisnis beroperasi dan berkesinambungan.</p> <p>Program ini terus mencari berbagai macam potensi peluang bisnis bagi orang-orang asli yang tertarik menjadi pengusaha. Program akan menyediakan bantuan teknis dalam bisnis melalui Unit Layanan Pengembangan Usaha. Unit ini menggantikan beberapa program kegiatan BHBEP yang telah dilaksanakan sejak tahun 2006.</p>
	<p>9. Sensus/survei dua tahun sekali yang tadinya dilakukan UGM harus diteruskan untuk memantau kemajuan program mata pencaharian. Untuk meningkatkan kegunaannya, sensus juga harus memonitor tren pengeluaran (konsumsi dan investasi) serta tabungan masyarakat.</p>	<p>Kami setuju. Sensus/survei dua tahun sekali akan terus dilakukan untuk memonitor progres pembangunan sosial dan ekonomi di Bintuni termasuk hasil program mata pencaharian. Sensus sosial-ekonomi 2013 diperluas agar mencakup Fakfak. Kami juga akan menganalisis dan memonitor tren pengeluaran dan tabungan untuk mencari tahu apakah ada perubahan terkait cara masyarakat mengelola pendapatannya agar dapat lebih mandiri.</p>	<p>Sensus/survei berikutnya direncanakan di awal 2016. Sensus ini akan mencakup data sosial yang diperbarui yang terkait pendapatan rumah tangga dan tren konsumsi.</p>
<p>Ketenagakerjaan Masyarakat</p>	<p>1. BP harus menggalakkan program Teknisi dari Papua</p>	<p>Program pengembangan teknisi untuk operasi & pemeliharaan (Operation and Maintenance)</p>	<p>Kami memiliki perjanjian dengan PT. Petrotechnic untuk mendukung program magang untuk operasi.</p>

Topik	Masalah dan risiko yang diidentifikasi dalam kunjungan TIAP	Tanggapan BP bulan April 2014	Rencana tindakan dan status
Papua, Pelatihan dan Pengadaan	yang baru untuk Operasi & pemeliharaan secara agresif guna memenuhi kebutuhan perekrutan untuk kegiatan operasional saat ini dan di masa depan. BP juga harus mendukung pengembangan pusat keterampilan di Papua agar menghasilkan tenaga kerja Papua terampil guna memenuhi kebutuhan BP dan kontraktor konstruksi.	<p>Papua yang baru saat ini tengah berjalan. Program pengembangan ini akan makan waktu tiga tahun dan saat ini sedang dipersiapkan. Penilaian pasar untuk mengidentifikasi penyedia jasa pelatihan yang berkualitas sedang berjalan dan lelang tengah dilaksanakan. Targetnya adalah menjalankan layanan terpilih di Kuartal 4 tahun 2014. Teknisinya akan segera dipilih, diutamakan masyarakat asli di Bintuni dan Fakfak.</p> <p>BP telah melaksanakan penilaian pasar untuk fasilitas pelatihan lokal di Papua dan mengidentifikasi beberapa sekolah menengah kejuruan potensial di Papua Barat yang memiliki fasilitas dan kurikulum yang baik untuk beberapa keahlian. Evaluasi lebih lanjut akan dijalankan guna mengidentifikasi keahlian yang diperlukan untuk kegiatan proyek dan kegiatan perawatan rutin.</p>	<p>Pertemuan perdana pelaksanaan kontrak (program orientasi magang teknisi) telah dilakukan di akhir bulan Juli. Mereka akan menyediakan orientasi selama enam bulan mengenai usaha minyak dan gas kepada 40 peserta. Di akhir bulan Agustus, 800 lamaran untuk mengikuti program Teknisi Magang Tangguh telah diterima.</p> <p>Selain itu, BP telah mengembangkan kerja sama selama tiga tahun dengan Polinef Bandung untuk meningkatkan kualitas politeknik Fakfak sebagai sekolah kejuruan standar. Politeknik Fakfak akan mengembangkan orang-orang terampil yang memenuhi syarat untuk memenuhi permintaan tenaga kerja untuk konstruksi Tangguh serta industri lainnya.</p>
	2. BP harus terus menyediakan pelatihan bahasa Inggris bagi peserta yang membutuhkannya. BP harus mencari tahu apakah ada permintaan untuk program ini di Sorong, Fakfak, atau lokasi lain.	<p>Kami setuju. Kami akan melanjutkan program pelatihan teknisi dan mengimplementasikan beberapa peningkatan untuk memastikan para teknisi memiliki pendidikan dan keterampilan yang tepat. Kami akan bermitra dengan pusat pelatihan keterampilan lokal di Papua yang dapat menyediakan pelatihan bagi teknisi feeder pool.</p> <p>Kami akan memonitor tingkat kehadiran dan</p>	<p>Upstream Learning baru saja memberikan kontrak baru untuk melanjutkan pelatihan bahasa Inggris untuk pekerja asal Papua di kilang.</p> <p>Pelatihan bahasa Inggris di luar kilang, misalnya di Jayapura atau Jakarta, juga dibayar oleh Tangguh bagi pekerja lainnya, seperti anggota tim CRP, yang mengambil pelajaran di luar jadwal kerja mereka.</p>

Topik	Masalah dan risiko yang diidentifikasi dalam kunjungan TIAP	Tanggapan BP bulan April 2014	Rencana tindakan dan status
		<p>progres pelatihan bahasa Inggris di Manokwari dan Jayapura. Jika program ini berhasil, kami akan menawarkannya di lokasi lain (misalnya Sorong atau Fakfak). Tak hanya itu, BP telah membentuk tim pembelajaran hulu yang akan mendukung pelatihan bahasa Inggris yang efektif.</p>	
	<p>3. BP harus menjelaskan dan mendesak pencapaian target perekrutan masyarakat Papua oleh kontraktornya, termasuk denda atas kegagalan mencapai target yang telah disepakati.</p>	<p>Sebagai bagian dari proses tender, Tangguh akan menjelaskan soal target perekrutan masyarakat Papua kepada kontraktor. Hal ini dilaksanakan sebagai bagian dari proses evaluasi Undangan Tender (Invitation to Tender) di mana komitmen AMDAL dilaksanakan. Kontrak akan memuat persyaratan khusus untuk mencapai target perekrutan masyarakat Papua dan Tangguh akan mengimplementasikan pengukuran kinerja manajemen demi mendorong pencapaian target ini. Hal ini akan mencakup pelajaran yang didapat saat fase konstruksi kilang 1 and 2 Tangguh.</p> <p>Kami juga akan memantau komitmen para kontraktor pada tahap operasi dalam merekrut dan mengembangkan tenaga kerja Papua mereka. Dalam dua tahun terakhir, kami berhasil mendorong kontraktor utama kami untuk memberikan dukungan lebih besar bagi pengembangan masyarakat Papua.</p>	<p>Kami memantau kemajuan kami secara cermat mengenai kebijakan untuk mencapai 85% pekerja Papua sebelum tahun 2029. Kami juga menyelenggarakan program pengembangan warga Papua kami yang meliputi pelatihan dan pengembangan yang dilaksanakan oleh kontraktor.</p> <p>Menurut data tenaga kerja, di bulan November 2015 kami telah mencapai angka sekitar 54% personel operasi Tangguh adalah warga Papua, dan 22% adalah penduduk asli. Sekitar 89 orang Papua telah menjabat sebagai supervisor atau manajer di Tangguh.</p> <p>Prioritas untuk semua program perekrutan dan pelatihan terus diberikan kepada warga asal Papua, terutama yang diartikan Tangguh sebagai masyarakat asli, dan warga Papua lainnya dari wilayah Teluk Bintuni.</p>

Topik	Masalah dan risiko yang diidentifikasi dalam kunjungan TIAP	Tanggapan BP bulan April 2014	Rencana tindakan dan status
	<p>4. Etnis Papua, terutama dari wilayah Teluk Bintuni, harus diprioritaskan dalam semua program perekrutan dan pelatihan masyarakat Papua.</p>	<p>Sesuai AMDAL TEP, penerima program Tangguh akan mencakup masyarakat asli dari empat suku di kampung-kampung di sekitar Tangguh di Bintuni dan Fakfak. Ini merupakan perubahan fokus dalam AMDAL baru dari DAV (pendekatan wilayah) menjadi masyarakat asli. Definisi masyarakat asli bagi Tangguh nantinya tak hanya mencakup etnis Papua, tetapi juga non-etnis Papua yang telah tinggal dalam waktu yang lama di kampung dan diterima sebagai bagian masyarakat. Kami akan memprioritaskan dan menargetkan program perekrutan untuk etnis Papua dari empat suku di kampung-kampung sekitar. Meski demikian, kami tak dapat mengabaikan etnis non-Papua jika etnis Papua yang memenuhi syarat untuk direkrut jumlahnya kurang atau tidak ada.</p>	
	<p>5. BP harus memfokuskan program pemberdayaan usahanya pada barang dan jasa yang akan dibutuhkan saat konstruksi, serta mendorong kontraktor dan subkontraktor EPC-nya untuk mempergunakan perusahaan-perusahaan itu jika memungkinkan. BP harus membuat sistem prioritas bagi perusahaan yang memenuhi</p>	<p>IEDP akan memfokuskan program pelatihan dan pemberdayaan usaha lokalnya guna memasok barang dan jasa yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional Tangguh dan proyek pengembangannya, serta menciptakan peluang bagi usaha masyarakat asli di pasar lain di Papua Barat. Bersama PSCM (Manajemen Pengadaan dan Rantai Suplai), IEDP akan mengembangkan kriteria tertentu untuk menilai apakah perusahaan masyarakat asli yang kompeten dan bisa diprioritaskan oleh kontraktor</p>	<p>Program IEDP memfasilitasi pembentukan unit Layanan Pengembangan Usaha (BDS) untuk mendukung pengusaha masyarakat asli ketika mereka mengembangkan bisnis mereka. Dukungan teknis juga akan diberikan oleh BDS untuk memenuhi kriteria dan standar bisnis rantai suplai bagi perusahaan minyak dan gas serta peluang bisnis lainnya di daerah Bintuni dan Fakfak. Unit BDS diluncurkan di akhir bulan Agustus dan sekretariatnya berada di Bintuni.</p>

Topik	Masalah dan risiko yang diidentifikasi dalam kunjungan TIAP	Tanggapan BP bulan April 2014	Rencana tindakan dan status
	standar BP.	Tangguh untuk menyuplai barang atau jasa.	
Hubungan Pemerintah dan Urusan Publik	1. BP harus meneruskan hubungan positifnya dengan kepala daerah sepanjang periode konstruksi, termasuk kontak rutin dengan Pangdam dan Kapolda.	Kami setuju. Kami akan mempertahankan hubungan dengan pemimpin pemerintahan termasuk Pangdam dan Kapolda sepanjang konstruksi dan pasca konstruksi.	Hubungan dengan Pangdam dan Kapolda merupakan proses yang berkelanjutan. Pada kuartal 2015 telah diadakan beberapa pertemuan dengan calon pimpinan, untuk memberi tahu mereka tentang Tangguh dan ICBS.
	2. Tim urusan publik BP harus berinteraksi aktif dengan media-media utama, dan menggunakan perangkat media sosial untuk berkomunikasi lebih efektif.	Kami setuju untuk berhubungan dengan media utama secara teratur di tingkat nasional dan lokal melalui saluran komunikasi yang tepat. Hal tersebut akan dipilih berdasarkan penilaian menyeluruh mengenai terhadap risiko dan manfaat yang terlibat.	Hubungan dengan terus dilanjutkan. BP telah mengembangkan media sosial sebagai saluran untuk menginformasikan kabar terbaru mengenai Tangguh dan melibatkan mereka secara aktif untuk memperoleh masukan bagi Tangguh. Selain itu kami juga menjaga saluran komunikasi konvensional seperti kunjungan pemangku kepentingan ke lokasi Tangguh dan KADATE untuk memberikan informasi yang jelas mengenai proyek Tangguh dan perkembangannya. Selama tahun 2014, kami menyelenggarakan dua kunjungan media setempat dan nasional lokasi Tangguh. Mereka terlibat dalam acara sosial kami sebagai pengamat. Dengan demikian BP dapat mempromosikan program-program sosial dan untuk memberikan perkembangan terbaru mengenai Tangguh dan proyek pengembangannya.
	3. BP harus menonjolkan Tangguh sebagai pemimpin	Kami yakin Pemerintah dan masyarakat harus menjadi pemimpin utama pengembangan masyarakat di Bintuni. Meski demikian, Tangguh	Buku Tangguh Sustainable Development Programme (TSDP) menyediakan kabar terbaru dan merinci Program Sosial Terpadu sebelumnya. Buku ini

Topik	Masalah dan risiko yang diidentifikasi dalam kunjungan TIAP	Tanggapan BP bulan April 2014	Rencana tindakan dan status
	<p>pengembangan masyarakat.</p>	<p>tetap berkomitmen memberdayakan dan memfasilitasi masyarakat dan Pemerintah Daerah agar dapat memimpin pembangunan. Tangguh juga akan memfasilitasi keterlibatan lebih lanjut dan mendukung pembangunan dari PSC lain yang beroperasi di area teluk Bintuni.</p> <p>Selain itu, kami meningkatkan kampanye kami melalui media nasional dan lokal terkait kontribusi Tangguh bagi pengembangan sosial di Bintuni, serta rencana kami untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lebih luas di Bintuni, Fakfak dan Papua Barat (sebagaimana disebutkan dalam AMDAL baru).</p>	<p>merupakan kerangka kerja untuk memenuhi komitmen AMDAL kami untuk manajemen dampak, serta memenuhi visi yang lebih luas dari Tangguh sebagai katalis pembangunan daerah yang berkelanjutan. Proses Nota Kesepahaman (MOU) 2015 pada TSDP membantu meningkatkan kesadaran pemerintah setempat mengenai kontribusi Tangguh terhadap pembangunan masyarakat. Dengan terus menerus melibatkan media, kami terus menyampaikan aktivitas dan pencapaian program.</p>
	<p>4. Forum pemangku kepentingan harus dilanjutkan tiap tahun di Teluk Bintuni untuk mendapatkan masukan dari Pemerintah, elemen masyarakat, dan pihak berkepentingan lain. BP juga harus meneruskan program kunjungan pemimpin kampung ke kilang LNG pada saat periode konstruksi.</p>	<p>Dari 2012 hingga awal 2014, Tangguh berinteraksi secara intensif dengan pemangku kepentingan di masyarakat, pemerintah daerah, dan LSM sebagai bagian proses AMDAL TEP termasuk menggelar konsultasi publik di 62 kampung di Bintuni dan Fakfak. Tangguh juga mendukung dengar pendapat publik mengenai AMDAL di Bintuni di bulan Desember 2013 dan Februari 2014, dengan dipimpin oleh tim dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), yang melibatkan lebih dari 200 peserta dari berbagai kampung, LSM, dan pemerintah daerah. Di masa depan, sebagaimana ditetapkan dalam AMDAL, Tangguh akan menggelar konsultasi rutin dengan pemerintah, masyarakat sipil, komunitas,</p>	<p>Rapat konsultasi dengan pemangku kepentingan utama telah diadakan di awal tahun 2015 di Bintuni. Rapat ini bertujuan untuk melibatkan pemerintah setempat agar mereka bisa memberi masukan pada proyek-proyek sosial Tangguh untuk lima tahun ke depan.</p> <p>Bupati Bintuni memfasilitasi acara ini. Acara ini melibatkan semua kecamatan di Bintuni dan sektor-sektor penting dalam program TSDP.</p> <p>Kunjungan tokoh masyarakat dilakukan setiap tahun. Di 2015 kunjungan ini direncanakan di akhir bulan Agustus.</p> <p>Forum Komunikasi Minyak dan Gas (FKM) untuk</p>

Topik	Masalah dan risiko yang diidentifikasi dalam kunjungan TIAP	Tanggapan BP bulan April 2014	Rencana tindakan dan status
		media, dan pihak berkepentingan lain. Hubungan dengan pemangku kepentingan juga mencakup kunjungan pemimpin kampung dan pemerintah daerah ke kilang LNG.	kawasan Pemalu (Timur) di bawah SKK Migas saat ini dipimpin oleh perwakilan Tangguh. Di Kuartal 2 tahun 2015 sebuah rapat perencanaan telah diadakan, dan sosialisasi minyak dan gas untuk pemangku kepentingan sektor lainnya telah direncanakan.
Tata Kelola dan transparansi	1. Dukungan jangka panjang untuk tata kelola yang lebih efektif dan transparansi di tingkat kabupaten sangat penting untuk keberhasilan program sosial Tangguh serta penggunaan pendapatan Tangguh dengan baik. Untuk memastikan implementasi yang efektif, BP harus menghindari jeda dan gangguan dalam program ini.	Kami setuju. Program tata kelola sangat penting untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan di wilayah ini. Kami akan membuat beberapa kontrak penghubung kecil untuk mencegah jeda dalam implementasi ketika kontrak utama pemerintah masih ditenderkan.	<p>Kontrak jangka panjang untuk program tata kelola sedang dikembangkan untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan lokal dan strategi TSDP yang baru.</p> <p>Serangkaian pertemuan dengan Bappeda telah dilakukan di awal 2015 untuk menentukan dan mengumpulkan masukan tentang masa depan program tata kelola.</p> <p>Kemitraan bagi Reformasi Tata Kelola (Kemitraan) melaksanakan penilaian kesenjangan pada program tata kelola pada bulan Juni 2015. Laporan dan rekomendasi akhir telah diselesaikan pada bulan September 2015.</p> <p>Kami juga menantikan kesempatan untuk bekerja sama dalam program tata kelola untuk masa mendatang dengan pemangku kepentingan utama seperti UNDP. Beberapa diskusi telah dilakukan antara Pemda, Tangguh, dan UNDP untuk berbagi ide-ide dan merumuskan strategi baru untuk memperkuat program tata kelola di Bintuni untuk jangka panjang.</p>

Topik	Masalah dan risiko yang diidentifikasi dalam kunjungan TIAP	Tanggapan BP bulan April 2014	Rencana tindakan dan status
	<p>2. BP harus memfokuskan dukungannya untuk Pemerintah Provinsi Papua Barat pada transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik.</p>	<p>Kami telah melakukan beberapa lokakarya untuk pemerintah provinsi Papua Barat mengenai industri minyak dan gas serta bagi hasil. Kami juga mendukung EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) dengan melaksanakan seminar transparansi untuk pemerintah provinsi di tahun 2012. Untuk program di masa depan, kami akan berkonsultasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan menawarkan pengembangan kapasitas bagi pejabatnya untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas.</p>	<p>Pada bulan April 2015 kami telah berhasil memfasilitasi sebuah lokakarya mengenai pembagian industri minyak dan gas serta bagi hasil untuk anggota parlemen dari kabupaten Teluk Bintuni. Transparansi dan akuntabilitas juga disertakan di dalam agendanya. Acara ini melibatkan Kementerian Keuangan, SKK Migas dan sekretariat EITI. Masukan yang diperoleh dari sangat positif. Acara serupa juga telah diselenggarakan pada bulan September 2015, yang menargetkan pemangku kepentingan utama di tingkat provinsi di Manokwari. SKK Migas Pamalu menyediakan dukungan penuh dalam memfasilitasi acara ini.</p>
	<p>3. BP harus berkonsultasi dengan Bank Dunia atau lembaga lain yang mampu, serta Gubernur dan Bupati untuk menentukan apakah analisis pengeluaran terhadap anggaran mereka masing-masing dapat dilaksanakan.</p>	<p>Kami akan berkonsultasi dengan Bupati dan Gubernur untuk mencari tahu apakah mereka bersedia melakukan analisis pengeluaran oleh Bank Dunia atau lembaga lain yang sesuai. Kami berencana melakukan ini dalam konsultasi kami dengan mereka mengenai program tata kelola untuk Kabupaten dan Provinsi.</p>	<p>Sebagai bagian dari lingkup kontrak Kemitraan, mereka melakukan analisis pengeluaran untuk anggaran Bintuni dan Papua Barat. Pekerjaan awal telah dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran mengenai konsep dan untuk mengumpulkan informasi kedua dari sumber lokal dan nasional. Studi ini mengharuskan kabupaten dan pemerintah provinsi untuk terlibat penuh dalam menentukan struktur anggaran secara mendetail. Studi ini diselesaikan pada bulan September 2015. Kami sedang menunggu laporan yang berisi analisis anggaran, transparansi, dan akuntabilitas.</p>
Pengelolaan pendapatan	<p>1. BP harus mendukung penggunaan dana yang dialokasikan Perdasus dana</p>	<p>Kami setuju bahwa hak masyarakat adat harus dihormati. Saat Perdasus DBH disahkan, harus ada beberapa peraturan daerah tambahan yang</p>	<p>Pelaksanaan Perdasus ditundai sampai Gubernur dan DPR Papua Barat mengesahkannya. Kami terus mengangkat masalah ini dengan wakil pemerintah di</p>

Topik	Masalah dan risiko yang diidentifikasi dalam kunjungan TIAP	Tanggapan BP bulan April 2014	Rencana tindakan dan status
	bagi hasil sumber daya alam oleh Pemerintah Daerah untuk pengakuan klaim adat yang sah terkait kepemilikan suku terhadap sumber daya alam.	harus diterbitkan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten. Peraturan ini akan mengimplementasikan Perdasus serta menjalankan fungsi mereka untuk mengakui hak adat yang sah atas sumber daya alam menggunakan dana bagi hasil yang ditetapkan Perdasus. Tangguh akan menawarkan bantuan untuk mensponsori universitas lokal untuk menyediakan naskah akademik untuk peraturan daerah khusus tersebut.	setiap kesempatan, agar hal ini memperoleh kemajuan. Dalam konteks menyetujui tanggapan terhadap klaim Rp 54 miliar, ratifikasi Perdasus merupakan agenda yang terus didiskusikan.
	2. BP harus membantu pembentukan dan pengembangan kapasitas pengelolaan badan yang akan mengurus dana perwalian untuk 10% bagi hasil pendapatan minyak dan gas yang dialokasikan Perdasus.	Kami setuju bahwa dana perwalian harus dikelola dengan baik. Pemerintah daerah dan masyarakat harus memimpin pembentukan entitas tersebut dan Tangguh dapat memberikan bantuan. Selain itu, pengelolaan dana perwalian adat harus diserahkan pada institusi dana perwalian adat tersebut. Tangguh dapat menawarkan pengembangan kapasitas bagi institusi itu.	Karena Perdasus belum diratifikasi, tidak ada lembaga adat ditunjuk untuk mengelola dana perwalian 10% ini. Setelah diratifikasi, Tangguh LNG akan memberikan dukungan yang telah disepakati atau sesuai.
	3. BP harus mendorong Gubernur dan Bupati untuk mengimplementasikan peraturan transparansi dan akuntabilitas dalam Perdasus DBH dengan mendukung analisis pengeluaran terhadap	Seperti disebut di atas, kami akan berkonsultasi dengan Bupati dan Gubernur untuk menentukan apakah mereka bersedia melakukan analisis pengeluaran sebagai bagian dari implementasi transparansi dan akuntabilitas. Meski demikian, transfer dana bagi hasil (DBH) ke provinsi digabungkan sebagai dana bagi hasil sumber	Analisis pengeluaran anggaran diharapkan untuk menangkap semua dana yang diterima di tingkat provinsi dan kabupaten, termasuk dana yang ditransfer dari tingkat pusat sebagai pendapatan sumber daya alam.

Topik	Masalah dan risiko yang diidentifikasi dalam kunjungan TIAP	Tanggapan BP bulan April 2014	Rencana tindakan dan status
	<p>semua pendapatan sumber daya alam yang ditransfer ke provinsi.</p>	<p>daya alam (DBH SDA), dalam kata lain tidak spesifik terkait Tangguh atau proyek lain yang berarti sulit melacak DBH Tangguh di tingkat Provinsi atau Kabupaten. Analisis pengeluaran dapat dilakukan terhadap anggaran di tingkat Provinsi atau Kabupaten atau terhadap DBH SDA serta bagian untuk pengakuan hak adat.</p>	
Lingkungan	<p>1. BP harus mengalokasikan sumber daya untuk mengeliminasi ketidakpatuhan yang ada demi mencapai status hijau dan akhirnya emas dalam audit lingkungan hidup oleh</p>	<p>Tangguh akan berusaha keras untuk mencapai status Hijau di tahun 2015 dan Emas di tahun 2018. Tangguh berkomitmen untuk mematuhi semua persyaratan AMDAL dan menerapkan peraturan Pemerintah Indonesia mengenai lingkungan hidup. Kami telah mencapai tingkat kepatuhan Proper Biru dua kali berturut-turut — dalam audit Proper (audit yang dilaksanakan Pemerintah terhadap kepatuhan sosial dan lingkungan perusahaan dalam AMDAL) terhadap Tangguh tahun 2012, dan di audit kedua tahun 2013. Menurut panduan Proper KLH, sebuah perusahaan sebaiknya mencapai tingkat penilaian Biru tiga kali berturut-turut. Perusahaan juga harus memberikan bukti peningkatan untuk menunjukkan bahwa perusahaan memiliki program lingkungan dan sosial (E&S) di luar persyaratan minimum agar layak mendapat nilai Hijau. Untuk mencapai nilai Emas, perusahaan harus mempertahankan nilai Hijau tiga tahun berturut-turut. Peringkat Emas merupakan pencapaian kepatuhan lingkungan tertinggi yang</p>	<p>Akan tinjauan AMDAL oleh Kementerian KLH (Proper) di tahun 2015. Karena Tangguh telah menerima Peringkat Biru tiga kali berturut-turut, maka format tinjauan adalah verifikasi mandiri tanpa ada kunjungan ke lokasi LNG. KLH akan menginformasikan kepada kami jika Tangguh ditunjuk sebagai kandidat untuk memperoleh peringkat Hijau.</p>

Topik	Masalah dan risiko yang diidentifikasi dalam kunjungan TIAP	Tanggapan BP bulan April 2014	Rencana tindakan dan status
		<p>membutuhkan kepatuhan 100% di semua parameter tanpa terkecuali. Sejauh ini sudah ada dua perusahaan hidrokarbon dengan pengalaman operasional lebih dari 15 tahun yang telah mendapatkan nilai emas.</p>	
	<p>2. Survei sumber daya ikan, udang, dan kepiting di Teluk Bintuni serta pemantauan lingkungan hidup harus dilanjutkan agar dampak konstruksi dan kegiatan operasional di masa depan dapat diukur.</p>	<p>Kami setuju. Kami telah melaksanakan pemantauan dan survei sumber daya ikan, udang dan kepiting di Teluk Bintuni secara rutin. Terkait studi dasar terhadap kontaminan sebelum konstruksi TEP, kami telah memasukan pemantauan dan survei tersebut sebagai bagian survei lingkungan dasar di tahun 2012 dan 2013.</p>	<p>Survei perikanan berikutnya direncanakan di awal 2016.</p>
	<p>3. BP bersama SKKMigas harus menjajagi berbagai opsi untuk teknologi baru guna mengurangi emisi CO₂.</p>	<p>Gas umpang Tangguh dari sumur yang ada sekarang (di anjungan VR-A dan VR-B) mengandung 12% CO₂, sementara untuk Proyek Pengembangan Tangguh, estimasinya hingga 15% CO₂. Ini berarti meningkatkan produksi akan meningkatkan emisi CO₂. Kami setuju dengan rekomendasi untuk bekerja sama dengan SKK Migas guna memantau teknologi baru yang dapat dipertimbangkan sebagai opsi bagi emisi GHG di masa depan.</p>	<p>Kami bekerja sama dengan SKK Migas untuk mengetahui apakah ada teknologi yang baru untuk pengelolaan CO₂. Akan tetapi, saat ini tidak ada kabar terbaru yang bisa dilaporkan.</p>